

# ENSIKLOPEDI



KAPOLRI  
REPLICA



**M. Ng. SOETJIPTO JOEDODIHARDJO**  
JENDERAL POLISI



PANITIA PENULISAN  
ENSIKLOPEDI KAPOLRI

**Pelindung**

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia

**Penasihat**

- Deputi Sumdaman Kapolri

**Ketua**

- Irjen Pol (Purn) Drs. Dasoeki

**Sekretaris I**

- Niken Wulansari

**Sekretaris II**

- Endang Purwaningsih, M.Si.

**Bendahara I**

- AKP. Supardjan (Staf Desumdaman Kapolri)

**Bendahara II**

- Soedarjati, S.H.

**Tim Penulis**

- Dr. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto (Koordinator)
- Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung
- Dr. Tadjoe Rizal Baidoeri
- Prof. Dr. Roesminingsih
- Dr. Purwadi
- Prof. Drs. Jacob Sumardjo
- Teuku May Rudi, S.H.MIR.MSc.
- Nirwanto, M.A.
- Agus Setyo Widodo, M.Si.
- Endang Purwaningsih, M.Si.
- Benny Yohanes M.Si.
- Harry Wijaya, S.S.
- Ede Aulah, S.S.
- Wijaya, S.Th.
- Rahman Jamal, S.S.

**Tim Penyunting Bahasa**

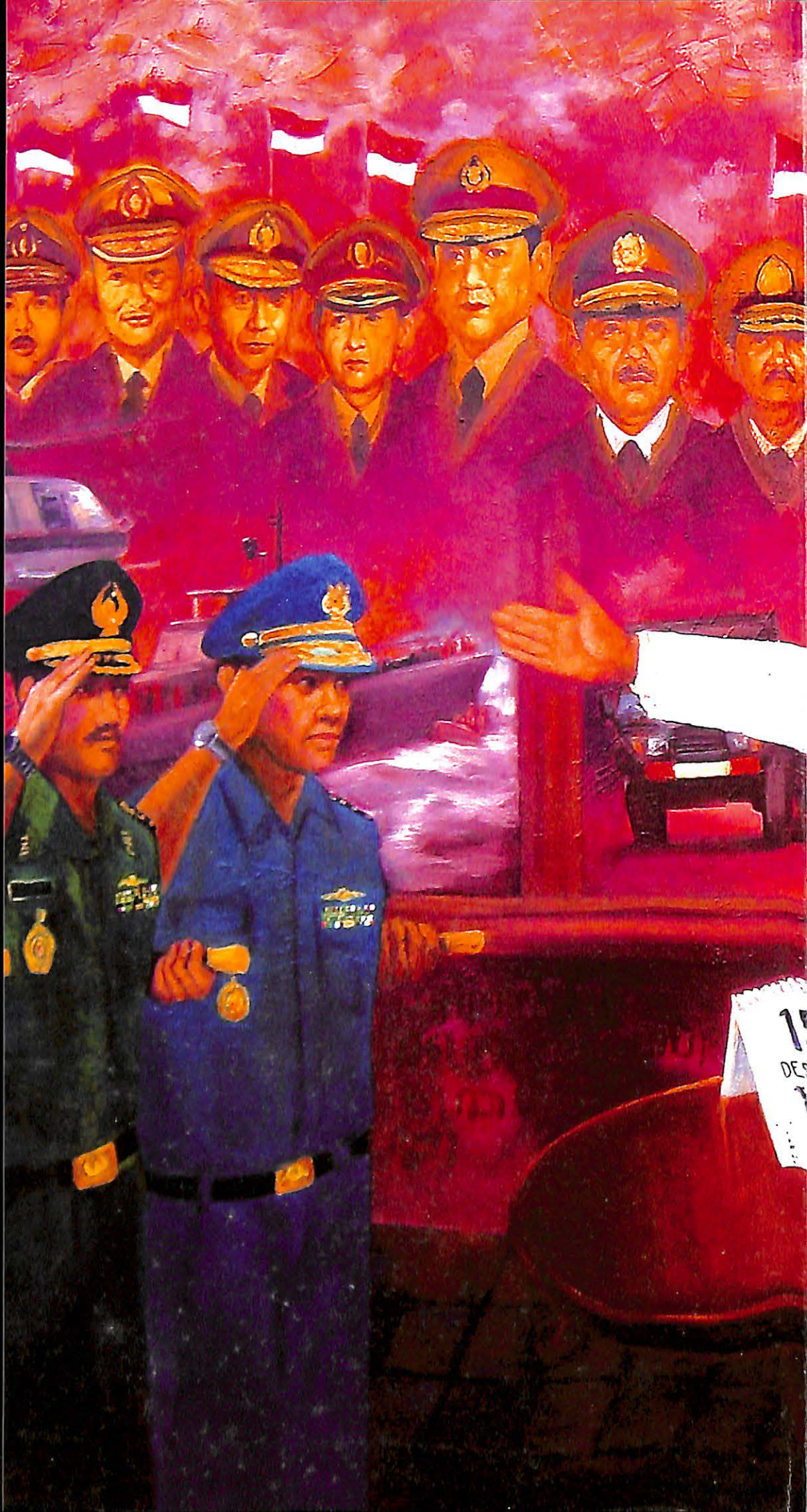
- Dhanu Priyo Prabowo, M.Hum.
- Jumariam, M.Ed.
- Dra. Atika Sya'rani

**Dokumentasi**

- Ilia T. Cempaka, S.E.
- Robby Wahyudi, S.E.
- Penny Warastuti, S.E.
- Pramudjo
- Indah Susanti
- Brahma Hemera

**Desain Grafis**

- Joni Hadi
- Akhmad Thobroni
- Sri Iswanto
- Kukuh Setyaji
- M. Lutfi Farhan



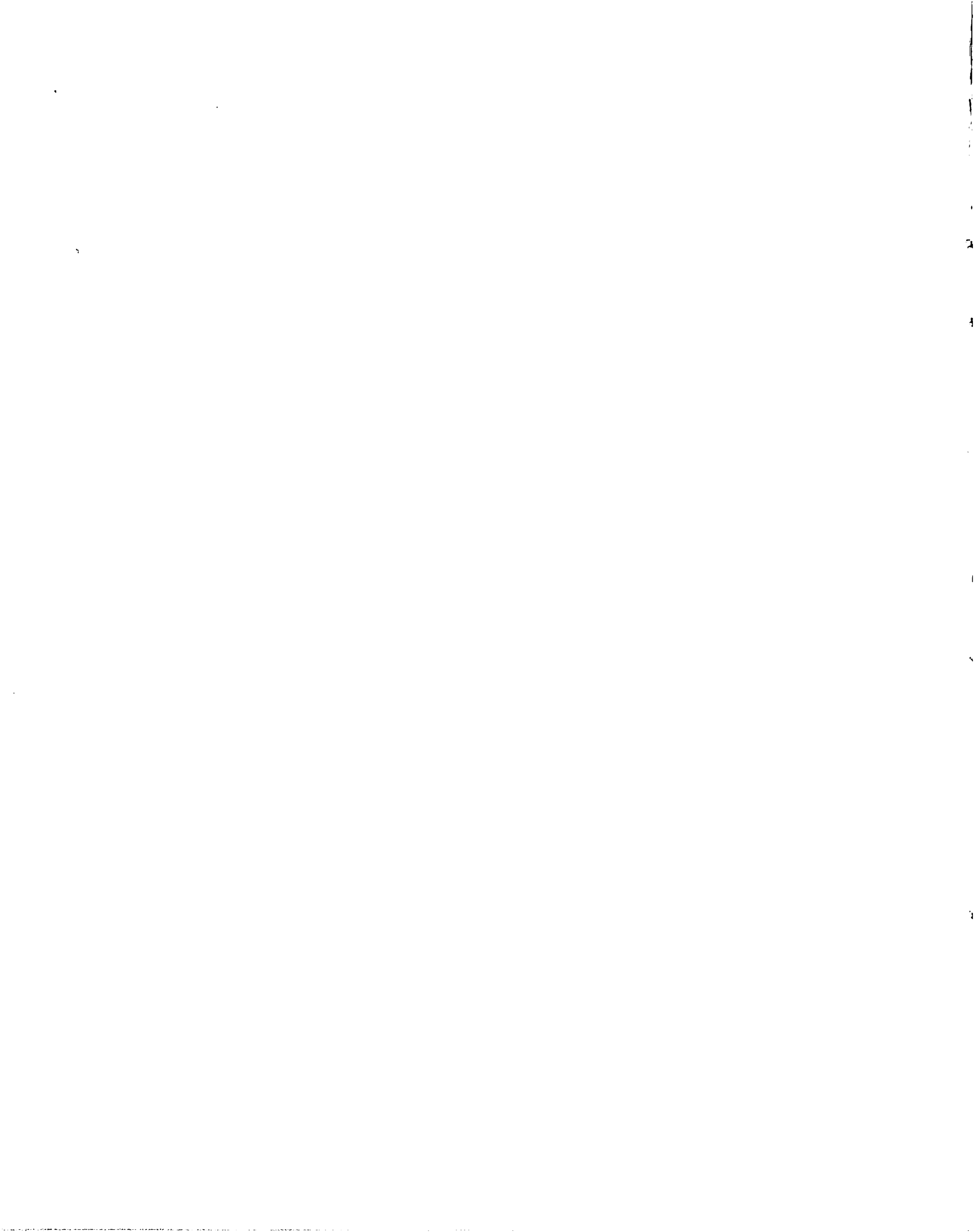


5  
EMBER  
1959

Dung, B. B. ...  
Mar 1959







ENSIKLOPEDI  
**KAPOLRI**

Jenderal Polisi  
**M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo**

Kapolri ke - 4  
Periode Tahun 1965 s.d. 1968

Diterbitkan Oleh:  
Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri

Jakarta  
2007

ENSIKLOPEDI KAPOLRI  
JENDERAL POLISI  
M. NG. SOETJIPTO JOEDODIHARDJO

**Diterbitkan Oleh:**

Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri  
Jl. Citra Raya 8 Antapani, Bandung

**Tim Penulis**

- Dr. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto (Koordinator) • Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung
- Dr. Tadjoe Rizal Baidoeri • Prof. Dr. Roesminingsih • Dr. Purwadi
- Prof. Jacob Sumardjo • Nirwanto, M.A. • Agus Setyo Widodo, M.Si. • T. May Rudi, M.Sc., MIR.
- Endang Purwaningsih, M.Si. • Benny Yohanes M.Si. • Harry Wijaya, S.S.
- Ede Aulah, S.S. • Wijaya, S.Th. • Jamal Rahman, S.S.

**Tim Penyunting Bahasa**

- Jumariam, M.Ed. • Dra. Atika Sya'rani • Dhanu Priyo Prabowo, M.Hum.

**Dokumen**

- Iliia T. Cempaka, S.E. • Robby Wahyudi, S.E. • Penny Warastuti, S.E.
- Pramudjo • Indah Susanti • Brahma Hemera

**Desain Grafis**

- Joni Hadi • Akhmad Thobroni • Sri Iswanto
- Kukuh Setyaji • M. Lutfi Farhan

**SUSUNAN PANITIA**

**Pelindung** : Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
**Penasihat** : Deputi Sumdaman Kapolri

**Ketua** : Irjen Pol (Purn) Drs. Dasoeki  
**Sekretaris I** : Niken Wulansari  
**Sekretaris II** : Endang Purwaningsih, M.Si.  
**Bendahara I** : AKP Supardjan (Staf Desumdaman Kapolri)  
**Bendahara II** : Soedarjati, S.H.

**Katalog dalam Terbitan**

Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri  
*Ensiklopedi Kapolri: Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, Kapolri ke-4,*  
Periode Tahun 1965 s.d. 1968  
Jakarta: Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri, 2007

ISBN 978-979-16296-0-7

Cetakan I  
2007

**Percetakan**

PT Gramedia Jakarta  
Isi di luar tanggung jawab percetakan





## PANITIA PENULISAN ENSIKLOPEDI KAPOLRI

### SAMBUTAN PANITIA



Sebagai salah seorang putra terbaik yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, mereka yang terpilih menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), tidak dapat disangkal lagi, telah mendarmabaktikan seluruh kemampuannya untuk tetap tegaknya *Tri Brata* dan *Catur Prasatya*. Hasil karyanya ketika memimpin, mengelola, dan menjaga eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tidak mungkin dilewatkan begitu saja, terutama dalam perjalanan bangsa Indonesia, terlebih di tengah era reformasi dewasa ini.

Insan kepolisian dan institusinya, terutama para Kapolri, telah menorehkan sejarah lewat tinta emasnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para Kapolri mulai dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini, telah turut memberikan andil di dalam membangun negara yang kita cintai ini. Di tengah segala keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki waktu itu sampai saat ini, Polri tetap sigap dan tanggap untuk menunaikan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kehadiran Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum dan bhayangkara negara sangat dibutuhkan. Situasi ini tentu saja membutuhkan manusia yang berkualitas untuk memimpin Polri. Sosok tersebut adalah Kapolri.

Timbul pertanyaan pada diri saya, apakah sosok Kapolri yang pernah memimpin Polri sejak pertama setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai, sampai saat ini, diketahui dan dikenal secara mendalam oleh seluruh insan Polri saat ini? Saya mencoba melakukan

pembuktian untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Saya melakukan tanya jawab kepada para perwira menengah Polri sampai dengan perwira tinggi, yang saya lakukan secara random, yang saat itu masih berdinasi aktif. Hasilnya, boleh dikatakan seluruhnya tidak mengetahui dan mengenal secara mendalam pemimpinnya yang pernah atau yang saat ini memimpin Polri. Apalagi, pemimpin Polri yang sudah purnawirawan atau yang sudah menghadap ke hariban Allah swt. Para pemimpin Polri yang relatif jangka waktu pensiunnya masih muda dan juga yang saat ini sedang memimpin Polri, mereka pun hanya dikenal secara sepintas saja.

Berdasar kenyataan tersebut, saya sangat prihatin dan merasa terusik. Dari catatan dan ingatan saya, memang sangat sedikit buku dan tulisan yang memuat para mantan Kapolri. Andaikata ada, hampir semua tulisan tersebut berbentuk biografi, yang sifatnya sangat subjektif.

Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi kekuranglengkapan data dan informasi tentang diri para Kapolri, sewaktu memimpin Polri? Jawabannya adalah saya harus membuat buku lengkap tentang diri pribadi para Kapolri, dari Kapolri pertama (Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo) sampai dengan Kapolri ke-18 (Jenderal Polisi Drs. Sutanto). Walaupun sudah purnatugas pada akhir tahun 1999, saya ingin memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi Polri dan bagi generasi Polri saat ini sampai dengan yang akan datang.

Gagasan tersebut mungkin juga karena sudah menjadi kehendak Allah swt, ternyata sama seide, ketika saya bertemu dengan Saudara Dr. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, selaku Ketua Yayasan Biografi Indonesia dan Koordinator Akademi Kebangsaan yang telah menulis lebih dari belasan buku biografi tokoh Indonesia, bertandang bersilaturahmi ke rumah saya di Bandung pada bulan Juni 2006. Pada saat itu, Saudara Dr. Nurinwa sudah membawa contoh buku Jenderal Polisi Drs. Sutanto, hasil penelitian persnya serta hasil penelitian lapangan ke Comal. Dari pertemuan tersebut saya bersemangat mendukung rencana penulisan buku mengenai Kapolri secara menyeluruh. Akhirnya, diputuskan membuat buku yang diberi judul **Ensiklopedi Kapolri**.

Ketika gagasan tersebut dikemukakan kepada Kapolri melalui Deputi Sumber Daya Manusia Kapolri (Irjen Polisi Drs. Basyir Achmad Barmawi) pada awal bulan Juli 2006. Di luar dugaan gagasan itu memperoleh sambutan dan dukungan yang besar dari Kapolri yang selanjutnya sebagai landasan/ dasar operasional tugas penulisan buku **Ensiklopedi Kapolri**, dengan

dikeluarkanlah surat Kapolri No. Pol: B/2070/IX/2006 dan No. Pol: B/2071/IX/2006/Sde SDM Tanggal 18 September 2006, Perihal Ensiklopedi Kapolri.

Dengan bekal amanah Kapolri tersebut, serta terinspirasi oleh semangat dan dedikasi para Kapolri yang pernah memimpin Polri ataupun Kapolri yang masih aktif memegang tampuk pimpinan Polri, dengan segala kerendahan hati, saya mencoba secara optimal menunjukkan betapa pentingnya kiprah, suka duka, dan keberhasilan para Kapolri untuk dituangkan dan ditulis dalam sebuah “Monumen” berbentuk sebuah buku yang lengkap serta komprehensif. Tentunya arti “Ensiklopedi” di sini dititikberatkan pada urutan ketika menjabat Kapolri, sementara isinya lebih banyak dituntun dari data pers (media cetak) pada saat Kapolri sedang menjabat. Dengan kata lain, bahwa data pers tersebut dijadikan penuntun dan menjadi dasar penulisan bagi para penulis, yang dilengkapi data dari buku-buku, majalah, dan wawancara, baik secara langsung ataupun tidak langsung maupun para mantan Kapolri khususnya yang belum pernah menerbitkan biografinya.

Dari uraian di atas, saya dipaksa harus benar-benar cermat untuk menelaah data. Harus diakui, terutama dari data pers, dari puluhan hingga ribuan judul tulisan atau pemberitaan di media cetak, tidak seluruhnya akurat menuliskan fakta dan kejadian sebenarnya. Oleh karena itu, perhatian saya harus benar-benar terfokus untuk mencerna ulang data media cetak (sebuah refleksi) sehingga rentetan beritanya menjadi runtut serta menjadi sejarah, sekaligus sebagai “kesaksian” zaman.

Harus saya katakan dengan jujur bahwa dalam menyusun/menulis **Ensiklopedi Kapolri** ini, saya bersama tim penulis sangat lelah. Akan tetapi, saya merasa berada di puncak kebahagiaan melebihi pengabdian sewaktu masih berdinamika aktif di Polri. Tantangan dan hambatan dalam menyusun dan menulis buku ini ternyata tidak kecil, tetapi semua itu tidak menjadikan saya berkecil hati. Justru sebaliknya, yang ada di benak saya adalah perasaan bangga dan puas serta dipacu untuk membuktikan dan menghadirkan buku yang belum pernah ada karena penulisannya bertitik tolak dari fenomena ribuan data pers. Selain itu, mengarahkan penulisan yang disusun dan ditulis oleh beberapa orang profesor, doktor dan sarjana, ternyata merupakan seni tersendiri dalam membuat sebuah buku karena mengompilasikan serta memadukan data yang ada untuk menjadi satu pemikiran ternyata memerlukan proses panjang.

Saya dan tim penulis sungguh-sungguh tidak diberi kesempatan untuk bersantai barang sejenak. Selain akurasi fakta, kami juga harus berhadapan dengan masalah bagaimana menyajikan kembali pemikiran yang muncul di dalam berita pers itu dengan bahasa Indonesia yang memenuhi standar nilai yang baik. Rentang waktu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2006, ternyata bukan hanya masalah lamanya waktu, tetapi juga persoalan yang dihadapi dan yang terjadi di tubuh Polri. Untuk itu, saya secara hati-hati mencoba untuk senantiasa melakukan *cross check* atas naskah ataupun tulisan yang sudah jadi, misalnya tentang penulisan istilah yang berlaku di tubuh Polri. Hal tersebut tampak sebagai masalah kecil, tetapi akan menjadi masalah besar jika sampai ke tangan masyarakat karena seakan terdapat ketidakseragaman istilah untuk para pimpinan Polri. Saya ingin menyajikan realita yang pernah terjadi di institusi Polri terutama Kapolrinya, selaras dengan sejarahnya.

Tidak hanya itu, masalah yang berkaitan dengan foto-foto para Kapolri dan keluarga menjadi hal yang harus saya atasi. Foto-foto yang merupakan pendukung teks, ternyata amat penting sebagai penjelasan terhadap suasana dan nuansa setiap Kapolri. Kegiatan mengumpulkan foto-foto di awal revolusi dari para mantan Kapolri yang sudah almarhum tentu memerlukan keahlian tersendiri. Apabila dalam pencarian tersebut kurang, maka untuk mengatasinya, saya harus mengambil foto-foto dari buku-buku beliau yang pernah terbit.

Semua hambatan yang ditemui menjadi suatu kegembiraan manakala saya mendapat dukungan dari para mantan Kapolri dan keluarga besarnya, baik dalam bentuk saran atau kritik, maupun dalam bentuk dorongan moril. Terlebih dorongan dari yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto berupa dukungan dana/anggaran, baik anggaran operasional dan penelitian, maupun anggaran pencetakan buku. Hal tersebut lebih menyemangati saya untuk menyelesaikan buku **Ensiklopedi Kapolri**. Dari kerja tersebut, yang memakan waktu kurang lebih satu tahun yang dimulai dari kegiatan penggalian data pers lebih dari lima ribu berita, penulisan, penyuntingan, desain, koreksi, sampai dengan pencetakan, akhirnya buku ini terselesaikan lengkap delapan belas buku **Ensiklopedi Kapolri**, mulai dari Kapolri pertama (zaman revolusi 1945) sampai dengan Kapolri ke-18 (zaman reformasi 2006).

Untuk semua dukungan, dorongan dan saran yang telah diberikan perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto, Bapak-Bapak para mantan Kapolri dan keluarga,

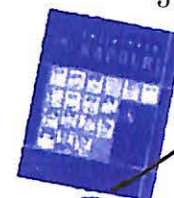
tim penulis, tim desain, tim editor, tim korektor, tim Gramedia dan semua yang terlibat dalam penulisan buku **Ensiklopedi Kapolri** ini, tanpa dapat saya sebut satu per satu namanya. Dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta Saudara-Saudaralah, buku ini hadir di hadapan pembaca.

Tidak lupa saya mengajak pembaca untuk mengkritik buku ini dan melihat perbedaan dengan cinta, dan melihat buku ini dengan hati. Jadikan rasa cinta dalam diri kita sebagai ajaran atau nyawa yang sangat berharga bagi jalan kita ke depan. Kita boleh tidak memiliki apa pun, tetapi bila kita setia pada nurani dan mau memperjuangkan itu, maka kita telah memulai perjalanan.

Selebihnya “tiada gading yang tak retak”, saya senantiasa menerima saran dan kritik demi lebih sempurnanya buku ini. Yang jelas buku ini ditulis di samping untuk generasi Polri saat ini juga untuk generasi Polri yang akan datang agar mereka menjadi lebih baik di dalam memimpin Polri.

Sebelum saya mengakhiri sambutan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa puncak keberanian seorang perwira/ksatria bukan saja harus berani dipenjara, dibunuh, dan mati, tetapi harus berani pula untuk dilupakan.

Jakarta, 1 Juli 2007



Ketua panitia

Drs. Dasoeki

**PANITIA**  
Inspektur Jenderal Polisi (Purn)



# SAMBUTAN KAPOLRI

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**  
**Salam sejahtera bagi kita sekalian**



M arilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan terbitnya buku **Ensiklopedi Kapolri**, sebagai salah satu rangkaian sejarah yang menguraikan tentang apa yang pernah diungkapkan, dilakukan, dan dituliskan oleh seorang Kapolri, ketika masih kecil hingga beranjak dewasa, selama meniti kariernya menjadi anggota Polri dan pada saat memegang jabatan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Polri yang

kita cintai ini.

**Ensiklopedi Kapolri** ini menjadi suatu informasi dan pengetahuan yang penting bagi Polri dan juga seluruh masyarakat Indonesia, mengingat sejak perjuangan dalam melahirkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ini, Kapolri melalui kepemimpinannya telah membawa Polri mengiringi dan ikut memberi warna pada dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara melalui tugas-tugasnya dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Melalui kepemimpinan seorang Kapolri, kita bisa melihat bagaimana Polri berkiprah, berinteraksi dengan setiap aspek kehidupan masyarakat, mengalami berbagai perubahan dalam format kehidupan bernegara, dan lain sebagainya. Walaupun pergantian seorang Kapolri akan terus terjadi, gaya kepemimpinan ataupun kebijakan-kebijakan selama seseorang menjabat sebagai Kapolri akan tetap ada dan dikenang bersama Polri yang akan tetap hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ada satu poin yang perlu dicermati berkaitan

dengan keberadaan Kapolri ini adalah apa yang telah dilakukan seorang Kapolri selama perjalanan hidupnya hingga akhir kariernya di Polri, akan menjadi pelajaran dan memberikan inspirasi berharga bagi generasi muda. Oleh karena itu, dengan terbitnya buku ini, diharapkan hal tersebut tetap tertulis dengan rapi, mudah untuk dikenang dan dipahami serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh anggota Polri dan masyarakat.

Menurut pandangan saya, hal utama yang ingin disampaikan di dalam buku ini adalah di zaman apa pun dan siapa pun pucuk pimpinan Polri akan selalu berusaha keras menjadikan Polri makin maju dan makin baik lagi ke depan. Hal ini tentunya dijiwai dari suatu keyakinan bahwa jabatan Kapolri adalah suatu amanah. Sebagai amanah, jabatan tersebut akan mengandung konsekuensi pertanggung-jawaban yang besar, tidak saja kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat ataupun kepada hukum, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui segala apa yang kita pikirkan dan kita lakukan.

Di samping itu, buku ini juga ingin memberikan suatu makna yang mendalam dan pesan moral yang kuat bagi penerus Polri dan masyarakat, bahwa bila kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Bila hari ini kita menanam kebaikan tersebut, maka yakinlah bahwa kebaikan pula yang akan kita terima pada esok hari. Namun, seandainya kita mungkin tidak merasakan kebaikan tersebut secara langsung, kita harus percaya bahwa ke depan anak, cucu, dan generasi penerus kita akan merasakan kebaikan itu. Komitmen kita semua untuk menjalankan pesan ini merupakan kunci utama membentuk **“Polri yang bermoral, profesional, dan modern serta dipercaya masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya”**.

Demikianlah sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

**Sekian dan terima kasih**  
**Wassalamu’alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, 1 Juli 2007

**KAPALA KEPOLISIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**



**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**



# DAFTAR ISI

SAMBUTAN PANITIA .....	v
SAMBUTAN KAPOLRI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PROLOG .....	3
BAB II LATAR BELAKANG KELUARGA MASA KANAK-KANAK .....	11
BAB III MASA SEKOLAH .....	17
3.1. Pendidikan di HIS .....	17
3.2 Pendidikan di MULO .....	18
3.3 Pendidikan di MOSVIA.....	20
BAB IV DARI AMBTENAAR MENJADI MEN/PANGAK .....	27
4.1 Sebagai Pimpinan di Pos Polisi Istimewa Besuki.....	28
4.2 Sebagai Inspektur Polisi Kelas I .....	31
4.3 Sebagai Wakil Komandan Mobile Brigade (Mobrig) Polisi Jawa Timur .....	33
4.4 Sebagai Komandan Mobile Brigade (Mobrig) Polisi Jawa Timur.....	36
4.5 Lektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) .....	40
4.6 Kepala Pusat Pertahanan Sipil .....	41
BAB V SEBAGAI MEN/PANGAK .....	47
5.1 Kepemimpinan pada Masa Orde Lama.....	52

5.1.1	Pembenahan dalam tubuh AKRI.....	52
5.1.2	Pembentukan Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) .....	57
5.1.3.	Peranan Polri dalam Penumpasan G-30-S/PKI .....	59
5.2	Kepemimpinan pada Masa Orde Baru .....	62
5.2.1	Situasi Politik Pasca Pemberontakan G-30-S/PKI.....	62
5.2.2	Mengawal dan Menyukseskan Pelaksanaan Catur Karya dan Dwi Dharma Kabinet Ampera .....	65
5.2.3	Penyelesaian Masalah Intern AKRI .....	66
5.2.3.1	Pemurnian dan Pembersihan dalam AKRI....	66
5.2.3.2	Digagalkannya Upaya <i>Pendongkelan</i> Pimpinan AKRI .....	68
5.2.4	Pemberantasan Korupsi dan Penyelundupan.....	70
5.2.5	Pembentukan Pramuka Bhayangkara.....	71
5.2.6	Memasuki Purna Tugas .....	73
	KATALOG MEDIA MASSA DAN KEPUSTAKAAN .....	83



BAB I

# PROLOG



## BAB I

# PROLOG



Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Ia lahir 27 April 1917 di Jember, Jawa Timur.

Jenderal Polisi R. Soetjipto Joedodihardjo berangkat dari keluarga yang hidup pada situasi bangsa yang sedang mengalami penjajahan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba apabila ia dikenal sebagai sosok yang memiliki disiplin tinggi, kerja keras, dan bersikap tenang serta tegas di dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dibesarkan dari keluarga pamong praja yang hidupnya sangat sederhana sehingga tidak heran apabila sifat, sikap, serta pola pikir orang tuanya selalu melekat pada dirinya. Semua itu tecermin dari kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawabnya pada saat menjabat sebagai Kapolri.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah Kapolri (ketika itu jabatan Kapolri masih bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian atau Men/Pangak) yang ke-4 sejak kemerdekaan Indonesia. Ia menjabat sebagai Kapolri-menggantikan Kapolri sebelumnya yaitu, Inspektur Jenderal Polisi R. Soetjipto Danoekoesoemoperiode 1965 hingga 1968. Ia merupakan satu-satunya Men/Pangak atau Kapolri yang mampu menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian Republik Indonesia pada saat masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru sehingga tidak mengherankan apabila masa kepemimpinannya dipenuhi dengan gejolak dan peristiwa penting yang melingkupinya tugasnya sebagai Men/Pangak.

Ia menghabiskan masa kecilnya di bangku sekolah, mulai dari HIS, KAE, MULO, dan menamatkan MOSVIA pada tahun 1939. Seperti lazimnya, para pelajar Jawa pada masa itu, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjadi ambtenar dengan menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki pada tahun 1939. Kemudian, pada tahun 1940, ia tetap menjabat sebagai AIB, tetapi bertugas di kota kelahirannya, Jember. Pada tahun 1942 ia dikirim ke Formosa (sekarang Taiwan) beserta 5 orang lainnya untuk pendidikan perwira Polisi, kemudian tahun 1944 kembali ke Indonesia menjadi komandan kompi Mobrig/Polisi Istimena di Bondowoso yang anggotanya lulusan Sekolah Polisi Mertoyudan Magelang.

Dua bulan setelah kemerdekaan RI atau tepatnya pada 1 Oktober 1945, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjadi Inspektur Polisi kelas I pada Pasukan Polisi Istimewa Besuki. Menikah 29 Mei 1946 di Bondowoso dengan R.A. Ina Tirto Adhisuwoyo dan dikaruniai 6 putra - putri, yaitu Jusuf Arief, Sidik Sulaiman, Nur Rachmi, Kamil Idris, Siti Sjaritah, dan Umi Swari. Prestasinya makin menanjak, ketika ia ditarik ke Surabaya untuk menjabat sebagai Wakil Komandan *Mobile Brigade* (Mobrig) Polisi Jawa Timur. Kemudian berturut-turut jabatan yang pernah diemban olehnya, antara lain sebagai Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950), Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1950). Komisarisi Polisi kelas I pada Jawatan Kepolisian Negara (1954), kemudian disekolahkan di Italia sehubungan dengan peran Mobrig dalam pengendalian kriminal bersama perwira-perwira Mobrig, antara lain Soetjipto Danoekosoemo, Sadikin Tisna Kusuma selama 3 bulan pada tahun 1956; Lektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1960), Komandan Komandemen Mobrig Pusat (1960), Asisten II/Kepala Staf Markas Besar Polisi Negara (MBPN) tahun 1962, dan Kepala Pertahanan Sipil (Hansip) Pusat pada tahun 1962.

Menginjak tahun 1962, ia sempat dikirim ke Amerika Serikat selama satu setengah bulan, dan pada tahun itu saat Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta olahraga Asian Games IV. Komisarisi Besar Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo ditunjuk menjadi Pimpinan Harian *Organizing Committee* Pada tahun 1965 dan tiga tahun kemudian, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian untuk masa jabatan sampai 1968.

Pak Tjip, demikianlah panggilan akrabnya sehari-hari di kalangan anak buah ataupun teman sejawatnya. Orangnyanya berbadan tinggi, gagah, dan kekar. Potongan tubuhnya mengingatkan kita pada postur seorang *veld-politie* di masa kolonial Belanda, tinggi dan berwibawa. Dengan tinggi badannya serta

Roma Januari 1956  
 Berfoto di depan kelas  
 Bersama Direktur  
 Academia de Politzia  
 Colonel De Gaelano

Berdiri dari kiri-kanan:  
 Komisaris Polisi  
 Kelas II Soetjipto  
 Danoekoesoemo,  
 Komisaris Polisi Kelas I  
 M. Ng. Soetjipto  
 Joedodihardjo dan paling  
 kanan AKP Sadikin Tisna  
 Kusuma



Roma 1956  
 Bersama rekan-rekan (dari kanan no. 3)





Roma-SCUOLA ALL  
VI UFF LI DI P S-2  
Corso per uff li sup  
di Polizia  
Indonesiana

sorot matanya seakan mencerminkan seorang komandan yang dihormati dan disegani anak buahnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (ketika itu masih bernama AKRI) dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, sangat ditentukan oleh kualitas pengetahuan, keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, dan yang tak kalah penting juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sikap kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai hakikat eksistensi tersebut dari AKRI. Dengan menghayati eksistensi kepolisian, wewenang, tugas dan fungsi kepolisian senantiasa akan terpanggil untuk merealisasikan wewenang, tugas, dan fungsi. Semua itu akan tecermin dari sikap dan perilakunya sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo berpendapat bahwa pada hakikatnya menjadi polisi adalah pekerjaan mulia karena polisi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Polisi adalah mulia karena polisi bukan saja mencakup hal yang lazim, melainkan juga mempunyai tugas mengamankan "revolusi Indonesia". Polisi



juga harus waspada terhadap setiap kejahatan kaum nekolim yang nyata-nyata telah berusaha keras untuk menghancurkan revolusi”.<sup>1</sup>

Sebagai seorang anggota Angkatan Kepolisian di masanya, Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tidak perlu diragukan lagi kepemimpinannya. Sebagai bukti, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mampu menempatkan jajaran Polri (AKRI pada masa itu) setingkat dengan jajaran penting lainnya dalam mengemban tugas negara di republik ini. Semua itu ia lakukan sejalan dengan keyakinannya sebagai seorang muslim yang taat menjalankan kehidupan beragamanya. Untuk meningkatkan pengetahuan agama, di sela-sela kesibukannya, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menyempatkan belajar ilmu agama dengan Buya Hamka pada setiap subuh. Bahkan, di masa pensiunnya hingga akhir hayatnya ia aktif dalam dunia pendidikan Islam dan duduk sebagai pengurus PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) Jakarta.

Sebagai putra bangsa yang matang di kepolisian, Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo boleh dibilang tidak pernah berhenti mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mengisi kemerdekaan yang sering ia nyatakan sebagai bentuk revolusi. Hampir dalam seluruh kehidupannya, ia mengabdikan diri dan tidak henti-hentinya memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia, terutama AKRI, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru. Meskipun pada masa itu masih terus berjuang mempertahankan dan mengisi proklamasi kemerdekaan, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mampu menempatkan peran Polri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Polri, seirama dengan era dan permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat itu.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diberi kepercayaan oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Sebagai petinggi AKRI, Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dikenal sebagai sosok yang selalu loyal terhadap kebijakan pimpinan negara. Sifat demikian itu tidak hanya ia tunjukkan pada era Orde Lama di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, tetapi juga di era Orde Baru di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo wafat pada 26 Maret 1984, dalam usia 67 tahun, meninggalkan seorang istri, enam orang anak, dan lima orang cucu. Bagi masyarakat Bondowoso figur M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo merupakan kebanggaan kota sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan besar di Bondowoso.

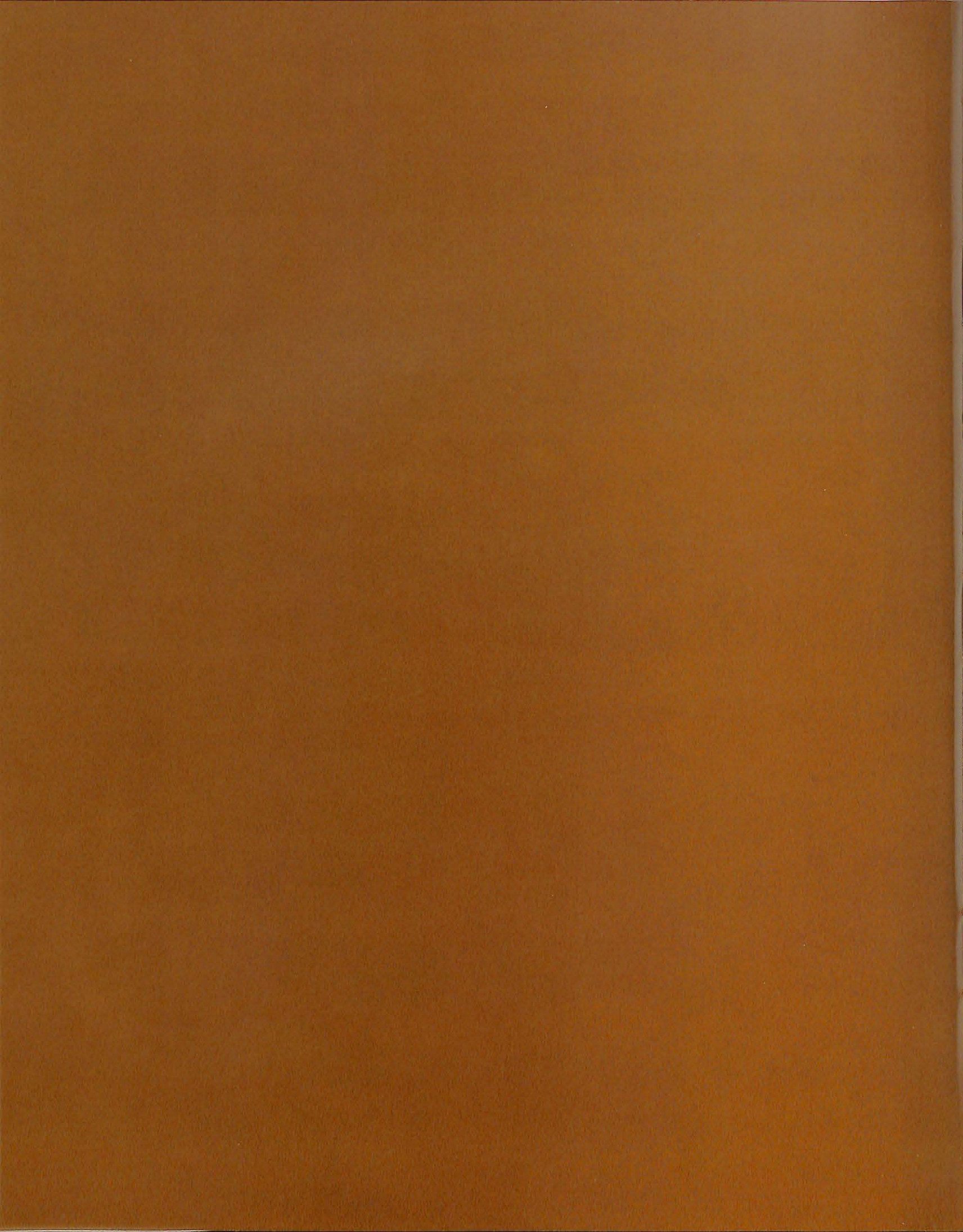
---

<sup>1</sup> *Angkatan Bersenjata*, 2 Juli 1965.



BAB II

LATAR BELAKANG  
KELUARGA  
DAN MASA  
KANAK-KANAK



## BAB II

# LATAR BELAKANG KELUARGA DAN MASA KANAK-KANAK



MAS Ngabehi Soetjipto Joedodihardjo dilahirkan di Jember, Jawa Timur. Jember adalah ibu kota salah satu wilayah setingkat Daerah Tingkat II/Kabupaten, di Jawa Timur. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara, ayahnya M. Ng. Mochamad Joesoef Joedodihardjo dan Ibu Habibah Joedodihardjo, dan seorang adik perempuan

Kamariyah.

Luas wilayah Jember adalah 2.485,25 kilometer persegi. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, di timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Perekonomian masyarakat Jember bertumpu pada sektor pertanian. Luas daerah persawahan yang ada sekitar 123.296 hektar. Hasil pangan lainnya, antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman perkebunan cukup penting bagi perekonomian daerah ini. Tanaman penghasil devisa meliputi cengkeh, tembakau, karet, kelapa, cokelat, teh, kapas, dan pinang. Sementara itu, perkebunan rakyat yang diusahakan, antara lain tembakau, kopi, cengkeh, kapuk randu, kelapa, kapas, dan pinang.

Kabupaten Jember mulai berkembang sejak tahun 1869 ketika tanaman tembakau mulai terkenal. Pada 1 Januari 1929, secara administratif Jember dijadikan kabupaten, dan atas nama Presiden, pada 3 Mei 1976 Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Kota Administratif Jember. Dengan demikian, Kabupaten Jember mencakup Kota Administratif Jember, 7 wilayah pembantu bupati, 27 kecamatan, dan 215 desa.

Keluarga M.Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah keluarga yang taat beragama/beribadah sehingga dalam setiap sifat ataupun sikap keseharian, ia dan keluarganya selalu berpegang pada norma dan nilai agama Islam. Baik dari keluarga ayahnya maupun ibunya, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo banyak menerima ajaran agama tentang iman, Islam, dan ihsan. Ia mendapat pengetahuan dan dilatih untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Rukun Iman yang berjumlah enam, Rukun Islam berjumlah lima, sedangkan ihsan, adalah ajaran dan nilai kebaikan serta moral agama Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan sekolah dan karier Raden Soetjipto Joedodihardjo hingga ia menjadi *orang* dan dapat *mikul dhuwur lan mendem jero wong tuwo*.<sup>2</sup>

Dasar atau latar belakang keluarga akhirnya mampu membentuk serta mendidik diri M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjadi orang yang tekun beribadah, terbuka, rendah hati, serta disiplin.<sup>3</sup> Sifat tersebut masih terbawa hingga ia menjabat sabagai Men/Pangak, yang *nota bene* sebagai orang nomor satu di jajaran Polri. Sementara itu, sifat dasar sejak kecil yang masih *mencolok* adalah sifat tekun beribadah dan selalu rendah hati.

Orang tua M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya di kemudian hari. Pendidikan agama cukup didapat dari lingkungan keluarga, tetapi untuk pendidikan lainnya tentu harus melewati jenjang pendidikan formal atau lewat pendidikan di sekolah sehingga, dalam kondisi bagaimana pun, mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.<sup>4</sup>

M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo termasuk beruntung, ia mempunyai kesempatan untuk belajar atau menuntut ilmu di lingkungan sekolah Hindia Belanda. Pada saat itu ia tumbuh dan berkembang dalam situasi yang penuh keprihatinan, serba kekurangan, dan penuh kesederhanaan. Hanya keluarga tertentu saja yang mampu dan sanggup menyekolahkan anak-anaknya di sekolah milik Pemerintah Belanda tersebut; salah satunya adalah keluarga M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.

2 "Orang" dalam falsafah Jawa atau dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah berhasil, punya prestasi dan memiliki kedudukan serta jabatan terhormat, sedangkan "*mikul dhuwur lan mendem jero wong tuwo*", artinya adalah dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya, tidak membuat malu, aib, dan mencemarkan nama serta derajat kedua orang tuanya.

3 *Sinar Harapan*, 5 Juni 1965, menyebutkan bahwa penanaman nilai-nilai Islam dan pengamalan tentang agama selalu diterima oleh Soetjipto Joedodihardjo lewat guru mengajinya. Selain soal agama, ia juga sering mendapat/menerima wejangan pengetahuan tentang kemasyarakatan.

4 *Berita Indonesia*, 10 Mei 1965.

Dalam diri M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, sebagai seorang anak, timbul kesadaran akan fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Hidup dalam kondisi masyarakat yang serba menderita dan memprihatinkan, secara tidak langsung telah mendidik dan mengasah mentalnya. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan baginya, tetapi ia justru makin terdorong dan termotivasi hingga dapat berprestasi kelak di kemudian hari.

Tidak mengherankan apabila hari-harinya lebih banyak dihabiskan di meja belajar dan berorganisasi. Ia sadar bahwa tidak sedikit biaya ataupun pengorbanan dari keluarganya untuk dapat atau hanya sekadar menyekolahkanya sehingga ia sempat berpikir bahwa hanya dengan ketekunan dan prestasi dalam belajar, ia dapat sedikit membalas pengorbanan orang tuanya.<sup>5</sup>

Jiwa nasionalisme dalam dirinya yang dipompakan oleh keluarga dan lingkungan, terus berkembang. Ia berpandangan bahwa hanya dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang tinggilah, anak bangsa seperti ia dapat menyumbangkan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa.<sup>6</sup>

---

5 *Sinar Harapan*, 5 Juni 1965.

6 *Berita Indonesia*, 29 Mei 1965.







BAB III

MASA SEKOLAH



## BAB III

# MASA SEKOLAH



Sudah merupakan satu kesempatan atau keberuntungan jika ternyata M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo berhasil memasuki sekolah secara tertib sesuai dengan jenjang pendidikan yang semestinya. Meskipun bukan melalui jalan yang mulus, ia merangkak, berjalan, kemudian merangkak lagi silih berganti. Bahkan, tidak jarang ia sering terjerebap atau menemui berbagai halangan dan rintangan dalam masa-masa sekolahnya.

### 3.1 Pendidikan di HIS

Jenjang sekolah pertama yang ditempuh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah *Hollands Inlandsche School* (HIS) atau sekolah zaman Pemerintahan Belanda setingkat sekolah dasar.<sup>7</sup> Pada umumnya, keluarga atau anak-anak pada zaman itu berlatar belakang kondisi keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka di *Volkschool*. Di samping itu, sekolah tersebut dikhususkan bagi kalangan keluarga Belanda/pejabat Pemerintahan Belanda dan juga bahasa pengantar yang dipakai di sekolah adalah Bahasa Belanda. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo bisa masuk ke sekolah HIS walaupun dibarengi dengan pengorbanan dan perjuangan orang tuanya hanya untuk

---

<sup>7</sup> Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, 1994, *Perintis Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*, Depsos, Jakarta, *Hollands Inlandsche School* (HIS) merupakan sekolah setingkat sekolah dasar pada zaman Pemerintahan Belanda yang dikhususkan bagi anak-anak Indonesia (pribumi) dengan lama pendidikan tujuh tahun, sedangkan *Hollands Chinese School* (HCS) diperuntukkan bagi anak-anak China, dan *Europese Lagere School* (ELS) untuk anak-anak Eropa dan golongan *Gelijkgesteld*.

dapat menyekolahkan anaknya.<sup>8</sup> Karena ayah M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah seorang asisten wedana, untuk itu sejak HIS M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo ditiptkan pada pamannya (diangkat anak) seorang wedana yang tidak mempunyai anak, yaitu R. Wiryo Projo.

Selama belajar di HIS, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dan siswa lainnya, selain makin bertambah ilmu pengetahuannya, tanpa disadari jiwa nasionalismenya berkembang dengan subur dalam sanubari para siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga pribumi. Ternyata, ucapan-ucapan guru pada saat mengajar di sekolah telah mampu membangkitkan semangat dan jiwa nasionalisme di antara para siswa HIS pada saat itu.

Seperti kebanyakan anak-anak seusianya, sifat M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo kecil tidak jauh berbeda dari sifat anak-anak sebayanya. Pulang sekolah biasanya ia bermain dengan teman-teman sekolahnya, berenang di sungai kecil (*kali*), berburu binatang, atau bahkan diselingi dengan sifat-sifat iseng dan kenakalan-kenakalan yang kadang kala membuat orang di sekitarnya merasa jengkel.

Selama menuntut pelajaran di HIS, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo termasuk salah satu siswa yang sangat tekun dalam belajar. Orang tua dan keluarganya sangat ketat dalam pengawasan belajar dan pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga setiap pulang dari sekolah dan bermain, biasanya ia mengulang kembali pelajaran yang didapatkan dari sekolah untuk dipelajarinya di rumah di bawah pengawasan keluarga. Walaupun di sekolah ia bukan termasuk siswa yang menonjol, tetapi karena ketekunannya, ia dapat lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, yaitu ke MULO.<sup>9</sup>

### 3.2 Pendidikan di MULO

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Holandsch Inlandche School* (HIS), M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo meneruskan pendidikannya ke *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO). Ia sangat menikmati menempuh pendidikan di MULO karena, selain bahasa pengantarnya Bahasa Belanda, di

8 *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 6, hal 461, menyebutkan bahwa seorang bangsawan tradisional atau pejabat pemerintahan, seperti wedana, dapat menyekolahkan anaknya ke HIS. Seseorang yang berpendidikan serendah-rendahnya MULO atau sederajat, atau yang berpenghasilan rata-rata 100 gulden per bulan juga dapat menyekolahkan anaknya ke HIS.

9 Mabes Polri, 1995 : *Polri dalam Angka dan Gambar dalam Rangka Menyambut 50 Tahun Kemerdekaan RI*, Mabes Polri, Jakarta, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sebelum melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, yaitu MULO, sempat menempuh terlebih dahulu jenjang sekolah KAE.

sekolah juga diajarkan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Dengan demikian, dari setiap siswa MULO, termasuk M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diharapkan mampu menguasai sedikitnya dua bahasa asing.

MULO merupakan jenjang pendidikan menengah pada masa kolonial, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama (SMP) sekarang, dengan lama pendidikan 4 tahun.<sup>10</sup> MULO dulu berasal dari kursus-kursus yang diadakan di sekolah rendah Belanda *Europese Lager School* (ELS) pada tahun 1903. Lembaga ini pada tahun 1914 diubah menjadi sekolah MULO. Ada pun yang diperbolehkan memasuki MULO adalah murid yang sudah tamat dari *Hollands Inlandsche School* (HIS).<sup>11</sup>

Setelah menyelesaikan pelajaran selama tujuh tahun di HIS, murid yang pandai serta mempunyai orang tua yang cukup mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO. Ketatnya persyaratan untuk belajar di sekolah MULO membawa akibat bahwa jumlah anak yang bisa memasuki sekolah MULO sangat kecil. Pada tahun 1930-an, berdasarkan sensus yang diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, ternyata rakyat Indonesia yang bisa membaca hanya 6,44 persen, sedangkan jumlah murid bumiputera di sekolah MULO waktu itu hanya 7.768 orang.<sup>12</sup>

M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo termasuk siswa yang mempunyai kecakapan dan kepandaian di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman sekolahnya. Oleh karena itu, tidak heran apabila ia dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Selain karena ia memang pandai, juga karena dalam dirinya telah terpatri tekad yang kuat bahwa ia akan berbuat sesuatu demi bangsa dan negaranya. Ia sadar bahwa hanya ketekunan dan kepandaian yang dimiliki yang akan dapat membuat kedua orang tuanya bangga terhadap dirinya.

Ia menyelesaikan jenjang pendidikan di MULO tepat waktu dan berhasil lulus dengan prestasi yang mengembirakan. Prestasi yang dibuat mengantarnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu pendidikan di OSVIA.

10 Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, 1994, *Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*. Depsos, Jakarta.

11 Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, 1994, *Perintis Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*, Depsos, Jakarta. Dijelaskan bahwa tamatan MULO dapat melanjutkan ke *Algemene Middelbaar School* (AMS), setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekarang atau *Hogere Burger School* (HBS) dengan lama pendidikan lima tahun.

12 *Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 10*, 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

### 1.3 Pendidikan di MOSVIA

Setelah menyelesaikan pendidikan di MULO, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo melanjutkan sekolahnya ke *Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (MOSVIA).<sup>13</sup> MOSVIA adalah sekolah menengah atas pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang merupakan sekolah yang sangat bergengsi pada zaman pemerintahan saat itu, yang bertujuan mendidik calon pejabat pemerintah pribumi. Setelah lulus mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Sekolah ini dimasukkan ke dalam sekolah keterampilan tingkat menengah yang mempelajari soal-soal administrasi pemerintahan. Masa belajarnya lima tahun, tetapi pada tahun 1908 masa belajarnya ditambah menjadi tujuh tahun. Pada umumnya, murid yang diterima di sekolah ini berumur 12-16 tahun.

Sekolah ini tersebar di Pulau Jawa, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Pada tahun 1900 sekolah ini mengalami reorganisasi dan diberi nama OSVIA Bandung, OSVIA Probolinggo, dan OSVIA Magelang. Soal keturunan merupakan faktor penting dalam penerimaan siswa OSVIA. Hal ini ditetapkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1919 oleh Pemerintah Belanda. Meskipun uang sekolah disesuaikan dengan penghasilan orang tua, bagi keluarga berpenghasilan rendah yang menyekolahkan anaknya di OSVIA biaya itu tetap dirasakan mahal. Penerimaan siswa seringkali harus disertai surat rekomendasi pribadi pejabat *Binenlandsch Bestuur* (BB) dan para bupati. Bupati-bupati itu dapat menggunakan haknya untuk mengajukan sanak saudaranya dan orang-orang yang disenanginya.

Di dalam pendidikan MOSVIA diberikan pendidikan khusus yang, jika disamakan dengan pendidikan sekarang, dapat disetarakan dengan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Sekolah MOSVIA berpusat di Magelang. Pada tahun 1969 para lulusan OSVIA menyelenggarakan reuni dan di dalam reuni tersebut dibicarakan juga tentang rencana pembangunan lima tahun Orde Baru. M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo merupakan salah satu dari dua orang wakil daerah yang berbahasa Madura dan teman sekelasnya adalah Moch.Noor (mantan Gubernur Jawa Timur).

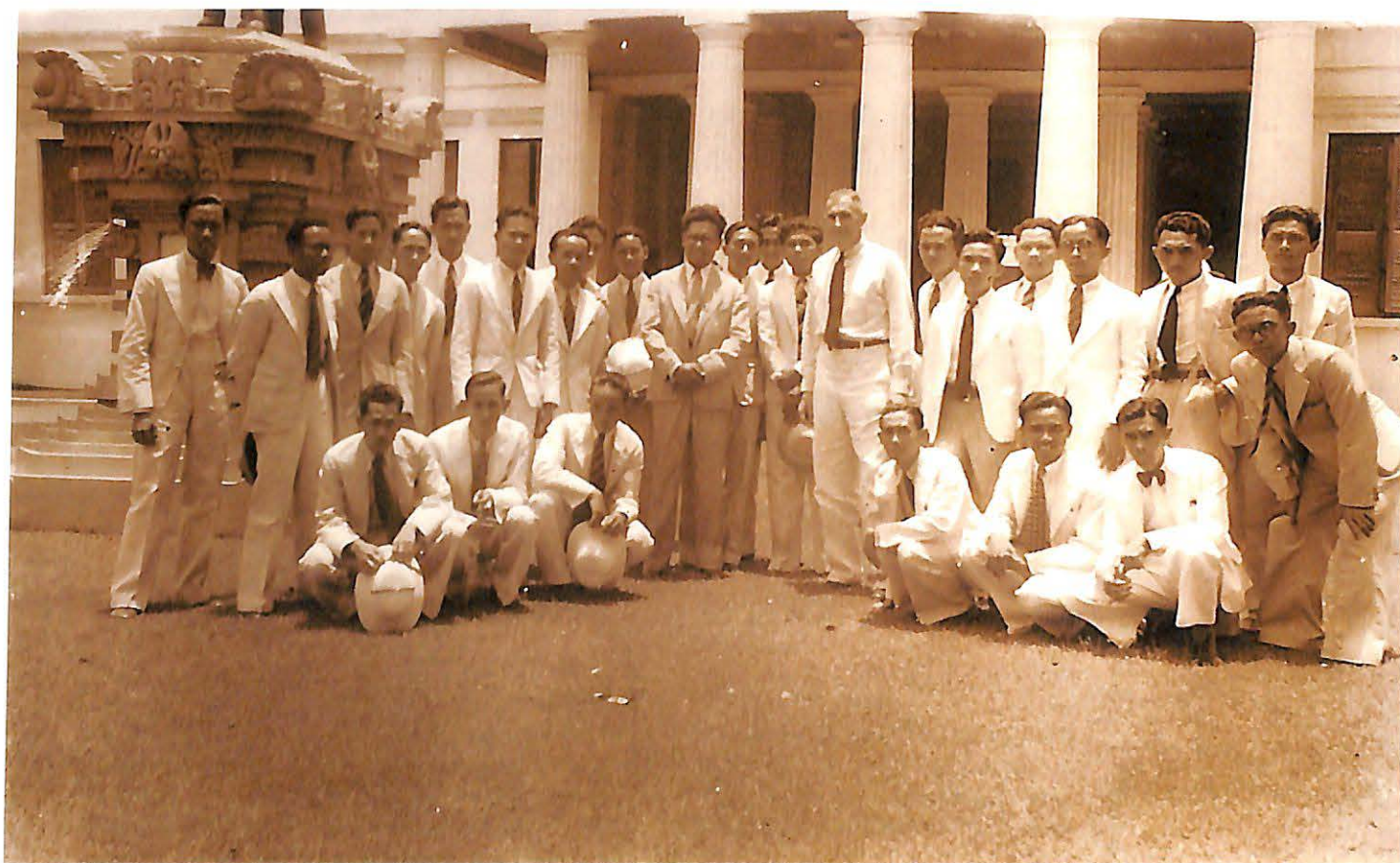
<sup>13</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid 11, 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. Pada tahun 1878 sekolah untuk mendidik pamongpraja didirikan dengan nama sekolah raja/sekolah para pemimpin (*Hoofdenschool*). Kemudian diganti namanya menjadi *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) pada tahun 1893 dan pada tahun 1902 seluruh cabang OSVIA digabung menjadi MOSVIA (*Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*)

Jenjang pendidikan MOSVIA dapat diselesaikan oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo pada tahun 1939 dengan prestasi kelulusan yang sangat mengembirakan. Dapat dikatakan, berawal dari MOSVIA inilah kariernya dapat berkembang dengan cemerlang hingga akhirnya mampu menduduki jabatan penting di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu sebagai Men/Pangak atau Kapolri. Banyak ilmu serta pengalaman selama menjalani pendidikan di MOSVIA tersebut telah membentuk serta mengubah jiwa dalam diri M. Ng. Soetjipto Joedihardjo untuk menjadi pemimpin yang mumpuni di lingkungan kepolisian.



Mosvia Bersama rekan-rekan tahun 1935, Soetjipto Joedodihardjo (berdiri paling kanan)

Bersama teman-teman dan Kepala Sekolah di Mosvia Soetjipto Joedodihardjo (berdiri no. 5 dari kiri)







*Mosvia* (Berdiri no. 2 dari kanan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo)





BAB IV

DARI AMBTENAAR  
SAMPAI MEN/  
PANGAK



## BAB IV

# DARI AMBTENAAR SAMPAI MEN/PANGAK



Hambatan dan rintangan ternyata masih tetap mengiringi hidup M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo. Meskipun ia telah menyelesaikan jenjang pendidikan, tetapi itu semua ternyata tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Namun, karena didasari oleh sifatnya yang selalu tekun dalam setiap hal, maka segala hambatan serta rintangan yang menghadang selalu dapat dilaluinya. Sebagai Men/Pangak yang merupakan puncak dari karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, ia sadar bahwa untuk mencapainya perlu pengorbanan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, khususnya lingkungan keluarganya.

Kehidupan masa kecil dan remajanya dihabiskan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dengan menggeluti buku-buku pelajaran sekolah, mulai dari HIS, KAE, MULO hingga menamatkan MOSVIA pada tahun 1939. Karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dimulai dari bawah sehingga tidak mengherankan apabila hampir semua jabatan yang berhubungan dengan pemerintahan/pamong praja ataupun institusi kepolisian telah dilaluinya hingga akhirnya ia menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan kepolisian sebagai Men/Pangak.

*Ambtenaar* merupakan *gerbong* jabatan pertama bagi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo yang harus dijalani olehnya sebelum mencapai kesuksesan dalam berkarier. Dengan jabatan tersebut ia secara tidak langsung mendapat wawasan dan cakrawala baru di lingkungannya yang baru (lingkungan kerja).<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, 1994, *Perintis Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*, Depsos, Jakarta. Dijelaskan bahwa *ambtenaar* adalah sekolah yang dikhususkan sebagai lembaga pendidikan zaman pemerintahan Belanda untuk mendidik bagi calon pegawai.

Seperti biasa, para kaum terpelajar di lingkungan masyarakat Jawa, termasuk M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, menjadi *ambtenaar* dengan menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki. Hingga kemudian selang satu tahun setelah ia menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki, pada tahun 1940, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tetap masih menjabat sebagai AIB, tetapi berpindah tugas ke wilayah atau kota kelahirannya, yaitu Jember.

Setelah itu, kariernya berjalan dengan mantap dan terus menanjak. Berturut-turut ia menjadi Mantri Polisi Situbondo pada tahun 1941, dan di tahun yang sama menjabat Mantri Polisi Surabaya. Kemudian, di tahun 1942 menjadi Mantri Polisi Bondowoso, lalu berpindah tugas di daerah Kalisat/Jember, hingga akhirnya menjabat sebagai *Itto Keibu* di daerah Bondowoso di tahun 1943. Dari sinilah akhirnya di tahun 1944, ia mendapat latihan ilmu kepolisian di Negara Taiwan. Sebulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, ia masih menjabat *Itto Keibu* di daerah Bondowoso.<sup>15</sup>

#### 4.1 Sebagai Pimpinan di Pasukan Polisi Istimewa Besuki

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi rakyat Indonesia bukan saja merupakan searik kertas tanpa isi, tetapi merupakan realisasi dari cita-cita rakyat yang selama ini diperjuangkan secara gigih. Oleh karena itu, setelah berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut diketahui secara umum, rakyat menuntut agar apa yang terkandung di dalam proklamasi itu dapat sesegera mungkin terwujud secara nyata.

Di mana-mana di seluruh pelosok tanah air bendera Hinomaru (Jepang) sebagai lambang kekuasaan pemerintahan Jepang diturunkan untuk diganti dengan Sang Saka Merah Putih. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan damai maka terpaksa dilakukan secara kekerasan. Pada waktu itu, masih berlangsungnya kekuasaan pemerintahan Jepang, diartikan oleh rakyat sebagai suatu tindakan yang mengingkari lahirnya negara baru

<sup>15</sup> Kepangkatan kepolisian zaman Jepang di Jawa dan Madura adalah sebagai berikut.

- a. *Santo-junsha* (Agen Polisi Kelas III).
- b. *Nitto-junsha* (Agen Polisi Kelas II).
- c. *Itto-junsha* (Agen Polisi Kelas I )
- d. *Junsha-butyo* (Komandan Polisi)
- e. *Nitto-Keibuho* (Pembantu Inspektur Polisi Kelas II )
- f. *Itto-Keibuho* (Pembantu Inspektur Polisi Kelas I)
- g. *Nitto-Keibu* (Inspektur Polisi Kelas II).
- h. *Itto-Keibu* (Inspektur Polisi Kelas I)
- i. *Nitto-Keishi* (Komisaris Polisi Kelas II).
- j. *Itto-Keishi* (Komisaris Polisi Kelas I).

Sekolah Perwira Polisi  
Istimewa Jepang



Republik Indonesia. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan Jepang harus secepatnya diambil alih dari tangan penguasa Jepang. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan melalui perundingan secara damai, sehingga rakyat tidak ragu-ragu untuk merebutnya dengan kekuatan senjata. Berhubung kondisi pada saat itu kepolisian dengan Badan Polisi Istimewanya merupakan satu-satunya instansi/institusi yang masih diizinkan untuk memegang senjata, maka tidak mengherankan apabila harapan untuk mendapatkan *backing* senjata itu ditujukan kepada kepolisian.<sup>16</sup>

Dengan menggunakan kepolisian sebagai basis kekuatan, rakyat berhasil merampas senjata dari Jepang, baik dengan jalan damai maupun melalui jalan kekerasan. Senjata hasil rampasan tersebut selanjutnya menjadi milik berbagai badan perjuangan. Badan-badan perjuangan tersebut bersama-sama dengan kepolisian menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Fakta-fakta yang terjadi kemudian menunjukkan, bahwa kepolisian ikut serta secara aktif dalam upayanya merebut kekuasaan dari pemerintahan/tentara Jepang. Bahkan di beberapa daerah, mereka merupakan pelopor utama yang militan, baik di dalam tindakan penurunan bendera Jepang dan menggantikannya dengan Sang Merah Putih, maupun di dalam pengambilalihan kekuasaan dari tangan penguasa Jepang. Seperti yang terjadi di daerah-daerah

<sup>16</sup> *Angkatan Bersenjata*, 7 Juli 1965. Menjelaskan bahwa Polisi Istimewa merupakan lembaga atau institusi kepolisian bentukan pemerintahan Jepang, dengan nama *Tokubetsu Keisatsutai*. *Tokubetsu Keisatsu tai* adalah bagian dari Kepolisian Jepang (*Keisatsutai*) yang merupakan pasukan polisi dengan tugas-tugas khusus.



Suasana di ruang kelas Sekolah Perwira Polisi Istimewa Jepang

lain di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya, terjadi perlawanan terhadap tentara Jepang yang dilakukan oleh rakyat dengan bantuan Pasukan Polisi Istimewa. Perlawanan-perlawanan tersebut bertujuan utama untuk merampas serta mendapatkan senjata dari pihak tentara Jepang.<sup>17</sup>

Perlawanan atau gerakan rakyat yang berhasil dilakukan oleh rakyat dan kepolisian dapat dikatakan merupakan titik pangkal dari usaha mempertahankan kelangsungan hidup kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menyandarkan pada potensi kepolisian yang memiliki dan menguasai senjata secara riil.<sup>18</sup>

Seperti juga yang terjadi di daerah Besuki, ternyata perlawanan terhadap tentara Jepang juga dilakukan di sini. Besuki seakan-akan merupakan “monumen bersejarah” bagi kehidupan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo. Di sinilah terlihat seorang M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo pertama kali bertugas/dinas di lingkungan kepolisian “sebenarnya” dan sudah memperlihatkan

<sup>17</sup> Irjen Polisi (Purn) Memet Tanumidjaya, SH, 1995. *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian, Pusjarah dan Tradisi ABRI*, Jakarta. Puncak perlawanan terhadap tentara Jepang adalah dengan dikepungnya markas tentara Jepang yang berada di seluruh kota Surabaya dan sekitarnya, di antaranya:

- a. *Tobu Jawa Bo-ei Tai* (Pertahanan Jawa Timur) di Krembangan.
- b. Markas Kaigun di Gubeng.
- c. Markas *Butai* di Don Bosco, Sawahan.
- d. Markas Yasran di Morokrembangan, Tanjung Perak dan Ujung.

<sup>18</sup> Jend. Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, 2006 : *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta. Kepeloporan satuan-satuan Polisi Istimewa di berbagai daerah pada waktu itu sangat menonjol, setidaknya sebagai penggerak dan pendorong semangat perjuangan melawan Jepang. Meskipun waktunya tidak bersamaan, tetapi semangat perlawanan dan heroisme para pemimpin Polisi Istimewa memberikan pengaruh terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.



perannya yang tidak kecil bagi perkembangan institusi kepolisian pada saat itu.

Perlawanan yang dipimpin oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo pada saat itu tidak dapat diimbangi oleh kekuatan tentara Jepang sehingga perlawanan yang dilakukan oleh tentara Jepang dengan mudah dapat dipatahkannya. Keberhasilan tersebut terbukti dengan diserahkannya seluruh persenjataan milik tentara Jepang kepada pihak Indonesia dan diterima oleh

- a. Residen Besuki Soerjadi, S.H.
- b. Kepala Polisi Keresidenan Besuki Jen Mohammad Soerjopranoto.
- c. Kepala Tokubetsu Keisatsutai Soetjipto Joedodihardjo.
- d. Tahirudin dan Soewito, kedua-duanya bekas *Daidanco*.

#### **4.2 Sebagai Inspektur Polisi Kelas I**

Dua bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1945, selepas mendapat pelatihan ilmu kepolisian di Taiwan, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mendapat kenaikan pangkat jabatan sebagai Inspektur Polisi Kelas I pada Pasukan Istimewa Besuki. Banyak peristiwa dan keberhasilan Soetjipto Joedodihardjo pada saat mengemban jabatan tersebut, antara lain pada saat ia mampu memimpin perlawanan-terhadap tentara Belanda pascapenyerahan kedaulatan pemerintahan Jepang kepada Sekutu, khususnya yang terjadi di daerah Besuki dan sekitarnya.

Peristiwa atau perlawanan tersebut diawali dan dilatarbelakangi oleh adanya pendaratan Sekutu di Belawan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Kehadiran pihak Sekutu sebenarnya tidak berpengaruh/masalah dengan Pemerintah RI pada saat itu. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika pendaratan tersebut ternyata dibuntuti oleh tentara Belanda *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) sehingga sudah dapat ditebak bahwa tujuan semua itu adalah adanya keinginan tersembunyi dari pihak Belanda untuk menguasai dan “mencengkeram” kembali sebagian besar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan turut sertanya NICA dalam tentara Sekutu, bangsa Indonesia berpendapat bahwa pihak Sekutu berada di belakang layar pernyataannya yang resmi, terdapat maksud tertentu, yaitu memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia dan menghidupkan kembali pemerintahan Hindia Belanda,

menghapuskan dan menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia serta segenap aparatnya, termasuk kepolisian.<sup>19</sup>

Akibat dari provokasi-provokasi pihak NICA, keamanan dan ketertiban tidak berlangsung lama, karena rakyat, pemuda, dan badan-badan perjuangan bangkit menyerbu pihak Sekutu. Begitu juga dengan anggota kepolisian, lewat kesatuan-kesatuannya mereka tidak tinggal diam. Mereka turut serta melakukan perlawanan atau pertempuran terhadap Sekutu, seperti yang dilakukan di Jawa Timur.

Di Jawa Timur, tentara Belanda yang berkedudukan di kota Surabaya pada 21 Juli 1947 melakukan serangan umum ke wilayah selatan dan timur Surabaya. Kesatuan-kesatuan polisi dari Batalion I dan II Mobrig Besar Jawa Timur, di bawah pimpinan Soekarli Soekarja, terlibat dalam pertempuran dan perlawanan terhadap tentara Belanda.<sup>20</sup>

Selain pertahanan menuju ke kota Malang, yang mendapat tekanan sangat hebat dari tentara Belanda adalah daerah di sebelah timur jalan besar Surabaya-Malang di antaranya Bangil, Pasuruan, Probolinggo, dan seluruh Keresidenan Besuki yang menjadi sasaran utama dari usaha perluasan daerah pendudukan Belanda. Di wilayah tersebut, kesatuan-kesatuan polisi yang terlibat dalam pertempuran melawan Belanda mendarat dari laut di beberapa tempat.

Karena seluruh Keresidenan Besuki menjadi sasaran utama dari usaha perluasan daerah pendudukan Belanda, maka tidak ada cara lain selain melibatkan Kesatuan Mobrig Besuki. Selanjutnya, di bawah pimpinan Inspektur Polisi Kelas I M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, Kesatuan Mobrig Besuki melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Walaupun mendapat tekanan dan perlawanan yang sengit dari pihak tentara Belanda, tetapi Inspektur Polisi Kelas I M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, dengan Kesatuan Mobrig Besuki yang dipimpinnya, berhasil mematahkan dan menggagalkan perlawanan tentara Belanda yang akan menguasai/menduduki wilayah Bondowoso.

19 Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, 1994. *Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*, Depsos, Jakarta. Sebagai akibat dari kegagalan Perjanjian Linggarjati, maka Aksi/Agresi Militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Sejak saat itu, dari daerah yang telah didudukinya, Belanda melakukan serangan umum secara besar-besaran ke daerah-daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia.

20 *Berita Indonesia*, Jakarta, 15 November 1960. Seluruh Batalyon Mobile Brigade Besar Jawa Timur pada saat itu di bawah pimpinan Inspektur Polisi M. Jasin yang berkedudukan di Malang.

Atas prestasi dan keberhasilan memimpin dan mengadakan perlawanan di Kesatuan Mobrig Besuki, karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo makin menanjak dan cemerlang. Setelah menjabat di Pasukan Polisi Istimewa Besuki, ia dipromosikan dan ditarik ke Surabaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1947).

#### 4.3 Sebagai Wakil Komandan *Mobile Brigade* (Mobrig) Polisi Jawa Timur

Tidak lama setelah M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur, ia kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Polisi (KP) II.<sup>21</sup> Semasa ia menjabat sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur, telah banyak prestasi dan keberhasilan dalam menyelesaikan dan menuntaskan suatu masalah, baik yang sifatnya lokal maupun nasional. Prestasi yang sangat fenomenal baginya adalah pada saat ia ikut menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948.

Meletusnya pemberontakan PKI Madiun adalah sebagai akibat kondisi politik negara pada saat itu (1946-1948) dalam keadaan *chaos*. Pertentangan dan ketegangan selalu terjadi dan makin memanas antara kelompok Pemerintah (Perdana Menteri Sutan Syahrir) dan kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Segala cara dipakai oleh kelompok Persatuan Perjuangan untuk mempengaruhi rakyat dan golongan yang sepaham dengan mereka untuk “menjauhi” sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sah pada saat itu.

Gerakan tersebut makin merajalela dan seakan mendapat kekuatan sejak kedatangan dan bergabungnya Musso dari luar negeri pada bulan Agustus 1948. Musso dikenal sebagai tokoh pembaharu PKI dan dinilai sebagai pemimpin komunis yang berwenang mengadakan perubahan-perubahan menuju perkembangan dan kemajuan organisasi PKI.<sup>22</sup> Dalam perkembangan waktu, sebagai gerakan yang berbasis PKI, kelompok tersebut makin mengintensifkan

21 Pembentukan *Mobile Brigade* (Mobrig) merupakan penyempurnaan organisasi kepolisian dan peleburan dari semua unsur Pasukan Polisi Istimewa, pada tanggal 14 Noveber 1946, dengan Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian R. Soemarto. Pembentukan Mobrig ini merupakan salah satu bentuk reorganisasi yang dilakukan oleh Jawatan Kepolisian Negara di Purwokerto, dengan susunan organisasinya adalah *Mobile Brigade* Besar Jawatan, *Mobile Brigade* Besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara.

22 Mabes Polri, 1995, *Polri dalam Angka dan Gambar Menyambut 50 tahun Kemerdekaan RI*, Mabes Polri, Jakarta. Melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR), Musso bersama dengan Amir Sjarifuddin pada tanggal 18 September 1948 memproklamkan berdirinya “Republik Sovyet Indonesia” dengan basis di Madiun.



Mobrig Jawa Timur  
saat persiapan  
Upacara penyerahan  
Kedaulatan RI oleh  
KKN R.S. Soekanto  
Tjokrodiatmodjo



gerakannya hingga tujuan akhir mereka tercapai, yaitu menggulingkan dan merebut kekuasaan dari Pemerintahan RI.<sup>23</sup>

Pada 8 September 1948, PKI yang dipimpin Musso mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun sebagai langkah pertama dalam upaya merebut kekuasaan Negara Kesatuan RI. Kekuatan bersenjata PKI pada waktu itu terdiri dari Brigade 29 yang berjumlah 6 batalion serta dua brigade dan kesatuan-kesatuan lain dari daerah Surakarta.

Kepolisian negara, dalam keikutsertaannya menumpas pemberontakan PKI Madiun tersebut, menugaskan Kesatuan Mobrig Keresidenan Surabaya, Mobrig Besar Jawa Timur, dan Mobrig Besar Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut perintah tersebut, Kepala Polisi Komisariat Jawa Timur memerintahkan Komandan Mobrig Besar (MBB) Jawa Timur Komisaris Polisi I Moehammad Jasin untuk membentuk pasukan.<sup>24</sup> Selanjutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya operasi tersebut dikoordinasikan dengan Gubernur Militer Jawa Timur. Dalam waktu singkat, Komandan Mobrig Besar Jawa Timur bersama dengan wakilnya, yaitu Komisaris Polisi (KP) II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo berhasil menyusun pasukan, dengan kekuatan sebagai berikut.

- a. Komandan Mobrig Besar Jawa Timur KP I M. Jasin sebagai pimpinan operasi.
- b. Wakil Komandan Mobrig Besar Jawa Timur KP II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sebagai pengendalian operasi satuan tugas.
- c. Komandan Mobrig Keresidenan IP I Soetjipto Danoekoesoemo sebagai komandan operasi.
- d. PIP I Iman Bachri dari Mobrig Keresidenan Surabaya, sebagai komandan Batalion Gabungan Mobrig Jawa Timur dan wakilnya PIP I Abdulrahman Rachman.

Pada 30 September 1948 pasukan Mobrig Polisi bersama-sama dengan kesatuan ABRI/TNI yang lain berhasil menyerbu Madiun. Didapat keterangan, dari beberapa anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) yang datang dari

<sup>23</sup> Jend. Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, 2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta. PKI menerima rumusan Musso "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Menurutnya, bahwa dunia pada saat itu terpecah menjadi dua, yaitu Blok Kapitalis Imperialisme (pimpinan AS) dan Blok Anti Imperialis (Uni Sovyet).

<sup>24</sup> Jend. Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, 2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta.

Madiun, bahwa pasukan FDR akan menghancurkan penjara Madiun dengan seluruh tawannya. Di samping itu, mereka juga sudah mulai mengadakan pembunuhan, baik terhadap tentara, polisi, maupun tokoh-tokoh agama.

Sekitar pukul 14.00, 30 September, pasukan Mobrig sudah memasuki kota Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan Siliwangi dari arah barat dan tepat pukul 17.00, kota Madiun dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Mobrig. Dalam perjalanannya menuju Madiun, mereka hanya mendapat perlawanan yang tidak berarti dari pihak pemberontak di desa Ngales dan sekitar Rejoagung. Begitu memasuki kota, pasukan Mobrig polisi langsung membebaskan penjara Sleko, penghuninya segera diselamatkan karena di beberapa tempat telah dipasang trek bom yang siap diledakkan. Di antara tawanan penjara itu adalah IP R. Suparto, Komandan MBK Madiun.

Sekalipun Madiun berhasil dikuasai, operasi pasukan Mobrig berlanjut karena sisa-sisa pemberontak masih ada yang berhasil meloloskan diri dan langsung bergerak ke arah selatan. Sasaran yang akan diduduki adalah Ponorogo. Di tempat ini mereka mulai melakukan aksi menangkap dan menculik rakyat yang pro-RI. Dalam pengejaran di luar kota Ponorogo, Musso dapat ditembak mati di Desa Semanding pada 31 Oktober 1948.

Setelah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, semua pasukan polisi dialihkan untuk menghadapi Belanda. Karena peranan Mobrig Jawa Timur cukup besar dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun dan sekitarnya, Panglima Besar Jenderal Soedirman memberikan penghargaan atas jasa-jasa kesatuan tersebut. Anggota polisi yang gugur dalam operasi penumpasan pemberontakan itu berjumlah 94 orang.<sup>25</sup>

#### **4.4 Sebagai Komandan *Mobile Brigade* (Mobrig) Polisi Jawa Timur**

Setelah keberhasilannya dalam keikutsertaan menumpas pemberontakan PKI Madiun, karier Komisaris Polisi TK. II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo makin cemerlang. Jabatan yang selanjutnya diemban adalah sebagai Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950). Dalam masa-masa tersebut, ia dan pasukannya, Kesatuan Mobrig banyak sekali terlibat dalam berbagai kegiatan/operasi yang

---

<sup>25</sup> Mabes Polri, 1995. *Polri dalam Angka dan Gambar Menyambut 50 Tahun Kemerdekaan RI*, Mabes Polri, Jakarta. Tokoh-tokoh polisi yang gugur dalam "Peristiwa Madiun", antara lain adalah Komisaris Polisi I R. Soenarjo Tirtodiprodjo, Pembantu Komisaris Besar Polisi Doerijat, dan Komisaris Polisi I Soeroko.

bertujuan menjaga keamanan dalam negeri. Keberhasilan yang mendapat apresiasi sangat tinggi, baik dari Pemerintah maupun dari pimpinan Polri pada saat itu adalah pada saat Komisaris Polisi TK. II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, sebagai pimpinan pasukan Mobrig berhasil menumpas Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung. Atas keberhasilan tersebut, dalam waktu yang tidak begitu lama, jenjang kariernya mengalami peningkatan dengan diangkatnya sebagai Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur.

Berbicara tentang APRA, mau tidak mau membicarakan juga tokoh bernama Westerling. Di antara perwira-perwira Belanda yang pernah bertugas di Indonesia, agaknya Westerling-lah yang paling “haus darah”. Pada bulan Desember 1946, ia dan pasukannya dikirim oleh pemerintahan Belanda ke wilayah Sulawesi Selatan untuk menghadapi para pejuang pribumi di wilayah tersebut.

Dalam jangka waktu tiga bulan, Westerling dan pasukannya telah melakukan tindakan yang sangat keji, yaitu pembantaian terhadap ribuan rakyat pribumi yang tidak berdosa. Pimpinan tentara Belanda melihat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Westerling tersebut menyalahi aturan dan kurang berkenan di mata mereka sehingga akhirnya, pada bulan Maret 1947 Westerling dipindahkan dari Sulawesi Selatan dan ditempatkan ke wilayah Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Namun, tindakan dan perilaku Westerling tidak berubah dan masih memperlakukan rakyat sama seperti waktu bertugas

Komandan  
Mobrig Jawa  
Timur



di Sulawesi Selatan sehingga akhirnya, ia mengundurkan diri dari dinas militer Belanda pada pertengahan tahun 1948.

Pada perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1949 Westerling berhasil membangun kekuatan militer yang disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Anggota pasukan APRA terdiri dari mantan tentara Belanda yang melakukan desersi dan anggota *Koninklijke Nederlandsche Indische Lager* (KNIL) yang merasa frustrasi mengenai masa depannya setelah pemerintahan Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan/persetujuan politik.

Dalam usaha menyusun kekuatan APRA, Westerling juga menjalin kerja sama dengan beberapa pejabat Negara Pasundan. Mereka berusaha dan mempengaruhi agar sebisa mungkin mempertahankan eksistensi Negara Pasundan dan menjadikan KNIL sebagai angkatan perang negara tersebut.

Pada 23 Januari 1950 APRA di bawah pimpinan langsung Westerling mulai melakukan aksinya. Mereka melancarkan serangan ke kota Bandung. Mereka bergerak dari wilayah Cililin dengan kekuatan mencapai 800 orang. Bersamaan dengan itu, dua peleton lainnya bergerak ke arah Jakarta dengan menggunakan kendaraan truk. Aksi yang mereka lakukan sangat biadab dan kejam. Mereka melucuti anggota polisi di Pos Cimahi, Cibeureum, dan pabrik Mecaf. Di samping itu, mereka juga menembaki siapa saja yang mereka temukan di jalan raya, terutama anggota ABRI/TNI.<sup>26</sup>

Untuk menghadapi dan menumpas APRA dan juga untuk membantu TNI, Kepala Kepolisian Negara saat itu mengirimkan bantuan pasukan di lapangan. Kesatuan Mobrig dari Jawa Timur dan Yogyakarta yang dikirim ke Jakarta, sebagai tulang punggung alat keamanan (Polisi RIS) untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, segera turut mengambil bagian dalam operasi APRA tersebut.<sup>27</sup> Kesatuan Mobrig yang terlibat dalam operasi tersebut di bawah pimpinan Komisaris Polisi Tk. II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.

Pada hari itu juga, pasukan APRA berhasil dipaksa meninggalkan kota Bandung berkat kesigapan aparat kepolisian dan TNI. Mereka melakukan razia

26 *Berita Indonesia*, Jakarta, 15 November 1960. Pasukan Westerling berhasil menduduki Staf Kwartir Divisi Siliwangi. Sebanyak 79 orang anggota TNI saat itu gugur dalam peristiwa tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong.

27 Mabes Polri, 1978, *Koprs Brigade Mobile Polri*, Mabes Polri, Jakarta. Penerbangan yang dilakukan oleh Kesatuan *Mobile Brigade* (Mobrig) ke Bandung dalam upayanya menumpas Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), merupakan *airlift* pertama yang dilakukan di Indonesia dalam pelaksanaan operasi keamanan.



secara intensif, sedangkan operasi pengejaran dilakukan terhadap pasukan APRA yang berhasil melarikan diri dan yang bergerak menuju Jakarta. Namun, kesatuan TNI dan Kepolisian Negara berhasil menghancurkan dan menumpas pasukan APRA yang berada di wilayah Cianjur.<sup>28</sup>

Gerakan APRA di Bandung merupakan bagian dari skenario yang disusun oleh Sultan Hamid II, seorang menteri tanpa portofolio dalam kabinet RIS. Direncanakan, APRA juga akan bergerak ke Jakarta, melancarkan serangan terhadap sidang kabinet. Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Ali Budiardjo serta Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang termasuk sasaran yang akan dibunuh. Sebagai kamuflase, Sultan Hamid II akan ditembak kakinya. Rencana yang akan dilaksanakan pada 24 Januari itu tercium oleh aparat intelijen sehingga gagal. Sultan Hamid II ditangkap, sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri menggunakan pesawat Angkatan Laut Belanda.

Bersamaan dengan pecahnya pemberontakan APRA di Bandung, pada awal tahun 1950-an di Jakarta muncul gerombolan Mat Item yang meresahkan warga ibu kota. Setelah diselidiki ternyata ada hubungan antara APRA dan gerombolan bersenjata Mat Item. Oleh Westerling gerombolan Mat Item ditugasi untuk mengganggu keamanan di Jakarta agar kelak memudahkan APRA menyerbu ibu kota dan membunuh para pemimpin RI, terutama anggota Kabinet RIS yang berasal dari RI.

Situasi yang tidak aman tersebut meresahkan warga Jakarta. Oleh Komandan Mobrig Pusat, M. Jasin, diambil langkah-langkah pengamanan. Pertama, melakukan konsolidasi kesatuan dan melakukan unjuk kekuatan (*show of force*) di Jakarta. Pameran kekuatan itu ditampilkan dengan kegiatan melakukan penggerebekan tempat-tempat yang menjadi basis gerombolan Mat Item. Langkah berikutnya adalah membangun “*stelsel keamanan*”, yaitu dengan mendirikan pos-pos dan asrama Mobrig di daerah-daerah pinggiran kota Jakarta seperti di Ciputat, Cileduk, Cengkareng, Cilincing, Cipinang, Pulo Gadung, Kramatjati, dan Kedung Halang. Ini berarti kota Jakarta dari empat penjuru sudah dikelilingi pasukan Mobrig sehingga pihak pengacau keamanan makin terdesak dan kocar-kacir tidak terorganisasi lagi.

---

<sup>28</sup> Mabes Polri, 1978. *Koprs Brigade Mobile Polri*, Mabes Polri, Jakarta. Penerbangan yang dilakukan oleh Kesatuan *Mobile Brigade* (Mobrig) ke Bandung dalam upayanya menumpas Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), merupakan *airlift* pertama yang dilakukan di Indonesia dalam pelaksanaan operasi keamanan.

Keberhasilan Komisaris Polisi TK. II M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dalam ikut serta menumpas gerakan APRA tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian keberhasilannya semasa menjabat sebagai Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur. Atas keberhasilan tersebut, pada tahun 1954, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dipromosikan lagi untuk menduduki jabatan di Jawatan Kepolisian Negara dengan pangkat Komisaris Polisi Kelas I.

#### 4.5 Lektor Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Pada 4 Juli 1950 rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian, Dewan Kurator, dan Dewan Guru Besar Angkatan Kepolisian mengambil keputusan mengubah Akademi Polisi menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).<sup>29</sup> Perubahan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Menyelaraskan akademi polisi setingkat dengan perguruan tinggi.
- b. Untuk memajukan ilmu kepolisian sendiri.<sup>30</sup>

Dari adanya perubahan tersebut, siswa lulusan Angkatan I dari Akademi Polisi pada saat itu yang kemudian menjadi Angkatan I PTIK dan Angkatan II PTIK, setelah menyelesaikan pendidikannya diangkat menjadi Komisaris Polisi (KP) Kelas II. Angkatan I yang berjumlah 16 orang dapat mengikuti ujian dan lulus semuanya pada 17 Mei 1952

PTIK adalah perguruan tinggi yang diciptakan oleh pemerintahan Republik Indonesia sendiri sehingga melalui PTIK, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional dan ahli di bidang kepolisian dalam usaha membentuk susunan dan organisasi yang efisien demi negara dan bangsa.

Alam perkembangan PTIK makin hari makin bertambah untuk membekali diri guna menyesuaikan diri sebagai perguruan tinggi. Tentunya banyak kekurangan dan kendala yang harus diatasi oleh para lulusannya, di mana mereka harus menerapkan ilmunya dari bangku kuliah ke masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi PTIK berubah menjadi lembaga pendidikan yang dapat diandalkan bagi Polri dalam menghasilkan serta mendidik prajurit Polri menjadi andal dan profesional. Sudah pasti, semua itu

<sup>29</sup> Disjarah Mabes Polri, 1979. *Sejarah Pendidikan Kader Kepolisian Republik Indonesia (1945-1959)*, Disjarah Polri, Jakarta. Perubahan nama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No. 47/PM/II/53 mulai tanggal 1 September 1950.

<sup>30</sup> Inkopak, 1967. *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*, Mabes Polri, Jakarta. Menyikapi hal tersebut, timbul berbagai tanggapan terhadap PTIK mengenai kepolisian sebagai suatu ilmu. Di bagian manakah ilmu kepolisian tersebut merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pihak kepolisian menyesuaikan dengan pendapat *Barents*, yaitu bahwa "Ilmu Kepolisian ialah suatu ilmu yang mempelajari tugas dan kewajiban kepolisian di dalam masyarakat, dalam arti yang seluas-luasnya dan cara bagaimana.

tidak dapat tercipta tanpa adanya dukungan dari semua pihak/sektor, seperti fasilitas ataupun sarana pendidikan serta keberadaan para staf pengajar atau pendidik dalam lingkungan PTIK.

Peran dan perjalanan karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tidak dapat dipisahkan dari keberadaan PTIK. Bagaimana pun ia pernah turut andil dan berperan dalam memajukan serta mengembangkan lembaga pendidikan setingkat PTIK hingga dapat menjadi seperti sekarang ini. Bukti semua itu adalah pada saat, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diangkat menjadi Lektor PTIK 1960, setelah sebelumnya sempat menjabat dan berdinis terlebih dahulu sebagai Komisarisi Polisi Kelas I pada Jawatan Kepolisian Negara.<sup>31</sup>

Pengangkatan ataupun penunjukan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sebagai Lektor PTIK pada saat itu bukan tanpa sebab. Diketahui, bahwa ia dikenal oleh banyak kalangan, khususnya di lingkungan Polri, sebagai seorang yang tekun, tegas, dan selalu berprestasi bagus dalam setiap tugas yang diemban dari pimpinan Polri. Oleh karena itu, tidak heran apabila ia diberi kepercayaan untuk menjadi Lektor PTIK yang kelak kemudian hari tanpa disadari olehnya, berkat peran atau didikannya akan muncul perwira-perwira polisi andal, tangguh, dan profesional yang siap mengawal dan membangun bumi pertiwi.

#### 4.6 Kepala Pusat Pertahanan Sipil

Semenjak pengangkatan dirinya menjadi Lektor PTIK, karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo di lingkungan kepolisian tidak mengalami stagnasi, atau jalan di tempat, seperti anggapan semua orang pada masa itu. Sebaliknya, karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo makin cemerlang dan cenderung selalu mengalami peningkatan, baik menyangkut pangkat maupun jabatan.

Berbicara tentang karier ataupun jabatan, dikatakan bahwa karier M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tidak jauh dari Mobrig, karena setiap ia ditugaskan atau mengalami beberapa kali jabatan selalu saja akan kembali berada di lingkungan Mobrig. Dapat dikatakan, bahwa jiwa Mobrig telah mendarah daging dalam diri M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.<sup>32</sup> Setelah menyelesaikan tugas sebagai

31 *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, menyebutkan bahwa *Lektor* adalah sebutan bagi pengajar di Perguruan Tinggi (PT), berpangkat Pembina/Golongan IV/a; Asisten Profesor; pangkat sebelum atau di bawah profesor. Sementara itu, ada jenjang yang lebih tinggi, yaitu *Lektor Kepala* atau pengajar di PT yang bergolongan IV/c

32 *Berita Indonesia*, Jakarta, 15 November 1960. Nama M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tercatat dalam sejarah perjalanan dan eksistensi Mobrig (sekarang Brimob) di jajaran Kepolisian, ketika masih disebut AKRI, yang mana. Pada saat itu *Mobile Brigade* (Mobrig) lahir, dan tumbuh dalam alam revolusi

Lektor PTIK, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selanjutnya mendapat tugas dan kepercayaan kembali dari pimpinan kepolisian pada saat itu untuk diangkat sebagai Komandan Komandemen Mobrig Pusat pada tahun 1960. Oleh Bung Karno *Mobile Brigade* (Mobrig) diganti menjadi Brigade Mobil (Brimob).

Lingkungan Mobrig di mata M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo bukan lagi sebagai lingkungan yang asing ataupun baru sehingga dalam mengemban tugas tersebut ia tidak banyak mengalami kendala ataupun kesulitan. Tugas sebagai Komandan Komandemen Mobrig Pusat dapat dilalui dengan mulus tanpa cacat, sehingga pada tahun 1962, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo kembali diberi kepercayaan dari Polri untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai Asisten II/Kepala Staf Komisaris Jenderal Markas Besar Polisi Negara (MBPN).

Dua tahun kemudian, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Asisten II Kepala Staf Komisaris Jenderal MBPN, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diberi kepercayaan kembali oleh pimpinan Polri di Jakarta untuk mengemban tugas yang tidak ringan dan menantang, yaitu sebagai Kepala Pusat Pertahanan Sipil (Hansip) pada tahun 1962.<sup>33</sup> Pada tahun 1962 itu Mabes ABRI dipimpin oleh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Dalam struktur SAB saat itu ada organisasi yang disebut MADA HANSIP dan bertempat berkedudukan di Jalan Salemba (di depan Rumah Sakit St. Carolus). Nasution, waktu ditanya Presiden Soekarno siapa yang akan ditugasi sebagai ketua MADA HANSIP? Yang dikenal Nasution di lingkungan AKRI hanya Soetjipto Joedodihardjo sehingga dengan spontan dijawab tegas: "Akan saya rencanakan diisi oleh Jenderal Soetjipto." Bung Karno menegaskan: "Yang tinggi besar anak Brimob dari Jawa Timur itu?" Pak Nas cepat menjawab: Benar dialah yang saya maksud!" Jadi, HANSIP MADA itu organik dibawah SAB. Maka, terjadilah polemik bahwa Pak Tjipto Joedo di tarik dari percaturan perebutan pimpinan Polri saat itu. Tugas sebagai MADA HANSIP ini adalah tugas berat. Dikatakan sebagai tugas yang berat dan penuh dengan tantangan sebab tugas M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah memberi penyadaran terhadap rakyat bagaimana arti dan pentingnya dukungan dan keterlibatan rakyat dalam usaha atau ikut serta dengan komponen negara (ABRI dan Polri) dalam kegiatan pembelaan negara.

33 Puswankamra, 1970, *Sewindu Hansip-Wanra, Puswankamra*, Jakarta. Pembentukan Hansip diawali dengan pembentukan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) pada tahun 1958, baru pada tahun 1962 dan dikuatkan dengan Keputusan Menhankam No. 323/1967 istilah OPR diganti dengan nama Pertahanan Sipil (Hansip), dengan mencakup fungsi-fungsi, antara lain sebagai Perlawanan Rakyat (Wanra) dan sebagai Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, tingkat kesadaran politik rakyat yang sudah tinggi, hak-hak atas demokrasi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, maka setiap hak dan kewajiban yang diakibatkan akan selalu mendapat tanggapan yang kritis dari rakyat. Rakyat tidak akan menolak setiap pemenuhan hak dan kewajibannya, apabila rakyat dengan penuh kesadaran mengerti akan alasan-alasan mengapa rakyat harus memenuhi hak dan kewajibannya itu. Demikian halnya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pembelaan/pertahanan negara.

Pada masa lampau, terutama dalam masyarakat feodal, masalah hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara tidak dipersoalkan oleh rakyat. Hal itu disebabkan oleh adanya anggapan pada saat itu, bahwa hak dan kewajiban dari penguasa hanya untuk golongan tertentu saja dalam masyarakat yang mendapat kehormatan ikut serta dalam pertahanan negara.

Kondisi zaman atau negara pada saat M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjabat sebagai Kepala Pusat Pertahanan Sipil adalah bahwa keadaan negara sudah ada pada tahap berkembang/membangun sehingga terimbas dengan kondisi negara tersebut, pola pikir ataupun sikap dari rakyat pada saat itu juga mulai sadar dan kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Dalam hal ini, termasuk kebijakan yang menyangkut keterlibatan atau keikutsertaan kekuatan rakyat dalam kegiatan/kewajiban pembelaan negara.

Hal-hal di atas merupakan tanggung jawab sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo. Namun, semua itu dapat dijawabnya dengan bukti nyata di lapangan. Keberadaan hansip, pada masa kepemimpinan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, telah berhasil mendapat tempat di hati rakyat. Dengan kesadaran yang tinggi, rakyat pada saat itu mendukung program/keberadaan hansip. Salah satu upaya yang dilakukan oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, antara lain berhasil meyakinkan dan menyadarkan rakyat bahwa kewajiban dalam pembelaan negara merupakan kehormatan bagi rakyat.

Pada tahun yang sama (1962) M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sempat dikirim atau diutus oleh pimpinan Polri pada saat itu untuk mengembangkan pengetahuan/ilmu ke Amerika Serikat, selama hampir satu setengah bulan.<sup>34</sup> Kemudian, pada tahun itu pula ketika Indonesia menjadi tuan rumah pesta

---

<sup>34</sup> *Berita Buana*, 10 Mei 1965.

olahraga terbesar di Benua Asia, yaitu *Asian Games IV*, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, yang pada saat itu berpangkat Komisaris Besar, ditunjuk untuk menjadi Pimpinan Harian *Organizing Committee*.

Berbagai jabatan dan prestasi gemilang yang berhasil ditorehkan oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mengantarkannya mencapai puncak karier sebagai prajurit Polri.<sup>35</sup> Brigjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo diangkat serta dilantik oleh Presiden Soekarno untuk menjadi orang nomor satu di jajaran Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Inspektur Jenderal Polisi R. Soetjipto Danoekoesoemo.<sup>36</sup>

---

35 *Sinar Harapan*, 13 Mei 1965.

36 *Sinar Harapan*, 10 Mei 1965. Menyebutkan bahwa pengangkatan Brigjen Polisi Soetjipto Joedodihardjo sebagai Men/Pangak disebabkan karena pada saat itu terjadi pengunduran diri Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo selaku Men/Pangak.



BAB V

SEBAGAI  
MEN/PANGAK





## BAB IV

# SEBAGAI MEN/PANGAK



Pengabdian serta loyalitas yang tinggi untuk mengamankan revolusi serta memajukan AKRI telah mengantarkan Inspektur Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111 tanggal 9 Mei 1965.<sup>37</sup> Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada tanggal 13 Mei 1965.

Ada cerita menarik saat menjelang M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dilantik atau diangkat sebagai Men/Pangak pada saat itu. Pada saat ada informasi atau berita yang menyatakan bahwa ia akan diangkat sebagai Men/Pangak menggantikan Men/Pangak lama Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo, ia minta waktu kepada Presiden RI Soekarno untuk menghadap.

Pada waktu itu, Buya Hamka sedang dalam tahanan Orde Lama, sedangkan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, termasuk salah seorang peserta kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di Masjid Al Azhar.<sup>38</sup> Ia aktif dan selalu menghadiri pengajian dan kuliah subuh tersebut.

Demi menghindarkan kesalahpahaman serta kemungkinan adanya informasi-informasi yang masuk kepada Presiden di kemudian hari mengenai

<sup>37</sup> Disjarah Polri, 1981. *Ikhtisar Kronologis Peristiwa Peristiwa Penting Selama 4 Windu Perkembangan Polri*, Mabes Polri, Jakarta. Disebutkan bahwa berdasarkan Kepres RI Nomor 15, tanggal 30 Januari 1963, sebutan untuk pimpinan Polri berubah nama, yang semula Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak).

<sup>38</sup> *Berita Buana*, 27 Maret 1984. menyebutkan bahwa Buya Hamka adalah seorang ulama pengisi pengajian tetap kuliah subuh di Masjid Al Azhar.

hubungan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dengan Buya Hamka, maka hal itu mendorongnya untuk segera melapor kepada Presiden Soekarno, supaya terjadi *clearance*, dan jawab Bung Karno “ Baik, tidak apa-apa!”.<sup>39</sup>

Walaupun ia berlatar belakang atau ber-*back ground* sebagai Kepala Pertahanan Sipil (Hansip) seluruh Indonesia, tetapi banyak kalangan pada saat itu memaklumi dan sangat mendukung pemerintah/presiden dalam hal pengangkatan Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, memang dikenal sebagai sosok pekerja keras, tegas, dan berwibawa, juga dikenal sebagai sosok yang ramah serta taat menjalankan ibadah agama sehingga mendapat sebutan *sang pembaharu*.

Dapat dikatakan bahwa pengangkatan tersebut secara tidak langsung mengandung maksud sebagai wujud kepercayaan dan penghargaan Soekarno selaku Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata ataupun sebagai Pemimpin Besar Revolusi saat itu, terhadap Organisasi Pertahanan Sipil.<sup>40</sup>

Secara moral, Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo tergugah dan *terlecut* semangat patriotiknya oleh pidato Presiden Soekarno pada saat pelantikannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. “Salah satu tenaga, tempat kita berdiri adalah tenaga percaya kepada diri kita sendiri, kita tidak melihat hari depan yang gelap, tetapi hari depan yang cemerlang. Oleh karena itu, kita harus berjalan terus, melaksanakan kesempurnaan terus. Buatlah AKRI menjadi angkatan yang sempurna”.<sup>41</sup>

Di lain sisi, terdapat pihak-pihak yang mengambil keuntungan serta memanfaatkan pengangkatan Irjen Polisi Soetjipto Joedodihardjo sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, yang salah satunya adalah kelompok Brigadir Jenderal Polisi Soetarto, Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Dengan demikian, pengangkatan tersebut dirasakan oleh para pendukung Brigjen Polisi Soetarto sebagai suatu kemenangan. Kelompok mereka selalu berkeinginan dan mempengaruhi Men/Pangak yang baru ke arah garis revolusioner.

39 *Kompas*, 27 Maret 1984. Setelah G 30 S/PKI meletus, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak menghadap/melapor kembali kepada Bung Karno perihal Buya Hamka “Pak, saya selaku Men/Pangak telah mempelajari berkas Saudara Hamka ternyata tidak bersalah”. Maka Bung Karno menjawab “Ya, boleh!”.

40 *Sinar Harapan*, 10 Mei 1965.

41 *Berita Indonesia*, 10 Mei 1965.



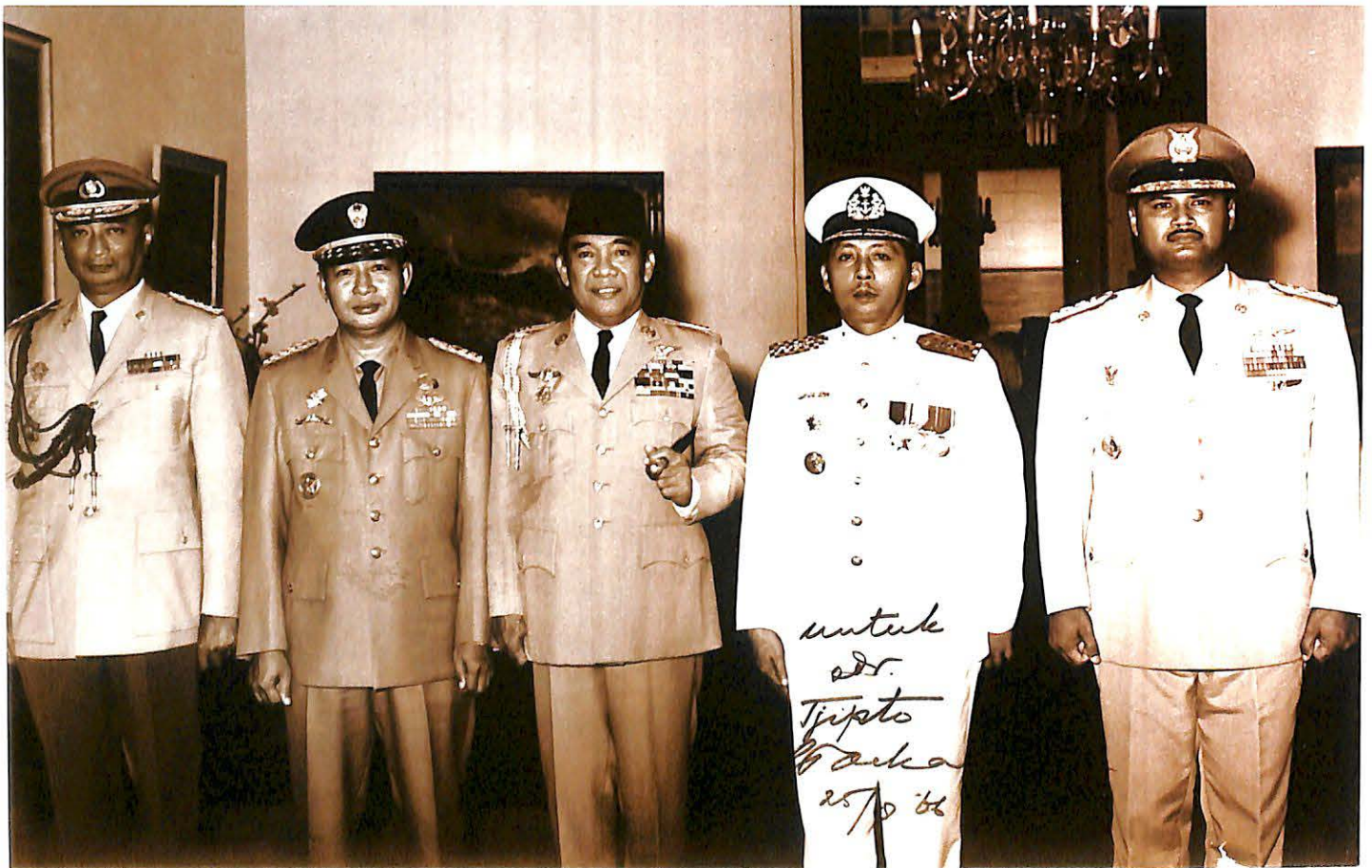
Serah Terima Men/Pangak  
dari Inspektur Jenderal  
R. Soetjipto Danoekoesoemo  
kepada Irjen. Pol. M. Ng. Soetjipto  
Joedodihardjo dengan  
Inspektur Upacara Waperdam I  
Dr. Soebandrio





Men/Pangak beserta staf  
ajudan dan pengawal

Bersama Bung Karno dan  
kepala staf ABRI setelah  
masing-masing mendapat  
kenaikan pangkat menjadi  
Jenderal





Men/Pangak menjadi Imam salat Magrib berjamaah dengan Bung Karno

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soetjipto Joedodihardjo akhirnya sedikit banyak terpengaruh oleh kelompok Soetarto. Kebijakan Soetjipto Joedodihardjo yang paling mencolok dan kontroversional, antara lain kebijakan mengganti 13 Pangdak sekaligus, mengganti pejabat-pejabat penting Staf Markas Besar (Mabes) Polri dengan mereka yang dikatakan kelompok *progresif revolusioner*. Di lingkungan Kepolisian Daerah Metro Jaya, jabatan Pangdak, Kepala Staf Pangdak, dan asisten-asisten dipegang oleh orang-orang kelompok Soetarto, sedangkan Brigjen Polisi Soetarto sendiri tetap memegang jabatan strategis sebagai Kepala Staf BPI yang dapat mengontrol serta mengendalikan Polri.

Kondisi di atas dapat dikatakan sebagai salah satu *kerikil tajam* yang harus dilalui dan diselesaikan oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak. Periode kepemimpinan Soetjipto Joedodihardjo pada saat itu dapat dikatakan sebagai masa yang paling rumit dan kompleks dalam periode sejarah Polri. Namun, semua itu dapat dijawab secara tuntas oleh Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dengan prestasi dan keberhasilannya, baik demi kemajuan Polri sendiri maupun demi keamanan, ketertiban, serta kedaulatan bangsa dan negara. Kalau ditarik dengan *benang merah*, kepemimpinan di era

Men/Pangak Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepemimpinan pada masa Orde Lama (Orla) dan kepemimpinan pada masa Orde Baru (Orba).

### 5.1 Kepemimpinan pada Masa Orde Lama (Orla)

Banyak peristiwa penting meliputi tugas Men/Pangak Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo pada masa kepemimpinan Orde Lama. Suatu masa yang merupakan tahun-tahun terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, pada waktu itu Presiden Soekarno sempat menegaskan bahwa kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri/AKRI sebagai unsur ABRI, mengemban amanat sebagai alat penegak hukum, selain koordinator kepolisian khusus, ikut serta dalam pertahanan negara, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kekaryaan.<sup>42</sup>

#### 5.1.1 Pembentukan dalam Tubuh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI)

Kondisi dan situasi politik pada pemerintahan Orde Lama (pemerintahan Presiden Soekarno) memang memanas dan kondisi negara, khususnya keamanan, menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut dengan sendirinya membuat jajaran AKRI harus pandai dan kuat dalam rangka menghadapi atau menyiasati kondisi pada saat itu. Langkah-langkah yang diambilnya, antara lain dengan melakukan pembentukan yang sifatnya internal ataupun eksternal, termasuk pembentukan yang menyangkut struktur organisasi AKRI pada saat itu. Salah satunya menyangkut perubahan atau pengembalian nama dari Kementerian Angkatan Kepolisian (Kemak) dikembalikan menjadi Departemen Angkatan Kepolisian (Depak).<sup>43</sup> Langkah tersebut mengandung maksud bahwa jajaran kepolisian harus senantiasa dan pandai dalam menempatkan diri atau menyesuaikan diri dengan keadaan pembentukan Kabinet Ampera pada saat itu.

42 Mabas Polri, 1995. *Polri dalam Angka dan Gambar dalam Rangka Menyambut 50 Tahun Kemerdekaan RI*, Mabas Polri, Jakarta. Berdasarkan SK Presiden RI Nomor : 32/1967, ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata RI merupakan bagian organisasi dari Dephankam meliputi : AD, AL, AU dan AK (Polri), masing-masing dipimpin seorang panglima yang bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab.

43 Disjarah Polri, 1981. *Ikhtisar Kronologis Peristiwa Peristiwa Penting Selama 4 Windu Perkembangan Polri*, Mabas Polri, Jakarta. Disebutkan bahwa berdasarkan SK Men/Pangak No. Pol : 11/SK/MK/1966, nama Depak diubah menjadi Kemak. Namun, perkembangan selanjutnya nama Depak dikembalikan lagi untuk mengganti nama Kemak berdasarkan Instruksi Menpangak No. Pol.15/Instr/MK/1966 tanggal 31 Agustus 1966.

Sejalan dengan perkembangan waktu, pembenahan struktur organisasi AKRI yang dilakukan Soetjipto Joedodihardjo terus mengalami perubahan dan perkembangan. Implementasinya adalah dikeluarkannya Instruksi No. 44/Instr/MK/1965 tentang *Regrouping* Sementara Komponen-Komponen dalam Organisasi Departemen Angkatan Kepolisian RI, dan menghapus Deputy Men/Pangak Urusan Teritorial, guna menyesuaikan dengan Keputusan Presiden RI No. 2138/1965 tanggal 24 Mei 1965.<sup>44</sup> *Regrouping* sementara dari komponen-komponen di Departemen Angkatan Kepolisian adalah sebagai berikut.

- a. Bidang Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi meliputi bidang yang termasuk koordinasi dan supervisi dari para Asisten Men/Pangak Bid. Intelijen, Bid. Operasi, dan Bid. Research.
- b. Bidang Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi/khusus meliputi bidang yang termasuk koordinasi dan supervisi dari para Asisten Men/Pangak Bid. Personalia, Bid. Anggaran, dan Bid. Logistik.
- c. Bidang Deputy Men/Pangak Urusan kekayaan/khusus meliputi bidang yang termasuk koordinasi dan supervisi dari para Asisten Men/Pangak Bid. Kekayaan dan Pembina Jiwa Revolusi.
- d. Diangkat seorang Asisten Men/Pangak Bidang Pemerintahan Umum yang termasuk Kompartemen Khusus.
- e. Komposisi Inspektorat Jenderal tidak berubah.

Langkah berikut yang dilakukan pada saat mulai menjabat selaku Men/Pangak adalah menyoroti adanya penggolongan serta pengelompokan di dalam tubuh AKRI.<sup>45</sup> Menurutnya, AKRI harus mampu berintegrasi dengan komponen bangsa lain, termasuk dengan rakyat sehingga angkatan kepolisian atau Polri harus benar-benar mampu dan turut serta mewujudkan asas keamanan lahir batin seluruh rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara melakukan kontrol sosial.

44 Dispen Polri, 1995. *Setengah Abad Polri Melayani Masyarakat untuk Kemitraan Polri-Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta. Sesuai dengan Kepres RI No. 2138/1965 yang menetapkan hanya tiga orang Deputy Men/Pangak, pada organisasi sebelumnya ada empat, yakni: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Urusan Administrasi, dan Urusan Khusus.

45 *Berita Indonesia*, 29 Mei 1965. Pidato Pertama Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sebagai Men/Pangak. Bahwa di dalam tubuh AKRI sekalipun tidak boleh terdapat golongan-golongan yang bertentangan satu sama lain, misalnya golongan Mosvia, golongan Doktorandi, golongan b, c, d, e, golongan Kotoka, golongan Mertoyudan, dan lain sebagainya. Penggolongan hanya boleh ada untuk menunjukkan masa pendidikan yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipupuk sebagai kekuatan untuk saling diadu.



Men/Pangak  
menghadiri HUT ABRI,  
5 Oktober 1967

Menyangkut kebijakan ke luar, Men/Pangak Irjen Polisi Soetjipto Joedodihardjo, di samping selalu berupaya memberantas kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif juga berupaya meningkatkan pelayanan serta pengabdian institusi kepolisian kepada rakyat, dalam arti yang seluas-luasnya. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat terlaksana apabila setiap personel AKRI selalu mengindahkan Sapta Marga, Tri Brata, Catur Prasetya, dan prinsip musyawarah, dengan tujuan akhir tercapainya integrasi bangsa.<sup>46</sup>

Kebijakan ke dalam Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo adalah berupaya menciptakan personel AKRI yang profesional, dengan prinsip *The right man in the right place*. Prinsip tersebut mengandung maksud bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya yang menyangkut mutasi/penempatan personel, harus dipikirkan atau disesuaikan antara pangkat dan jabatan.

Kebijakan-kebijakan Men/Pangak tersebut tidak lain bertujuan untuk menghadang dan menghalau upaya-upaya kaum nekolim, yang telah bertindak secara destruktif sehingga memungkinkan adanya upaya dari mereka untuk menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>47</sup>

46 Disjarah Polri, 1981. *Ikhtisar Kronologis Peristiwa Peristiwa Penting Selama 4 Windu Perkembangan Polri*, Mabes Polri, Jakarta. Disebutkan bahwa di samping Tribrata dan Catur Prasetya, Sapta Marga juga diperlukan bagi Polri sebagai salah satu unsur dari ABRI, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 116/1965, tanggal 20 Mei 1965.

47 *Sinar Harapan*, 5 Juni 1965.



AKRI pada masa itu mempunyai tugas yang sangat mulia karena tugas sebagai polisi tidak saja mencakup hal-hal yang lazim, tetapi juga mempunyai tugas lain, yaitu mengamankan Revolusi Indonesia. Dengan demikian, polisi diharapkan untuk selalu waspada dan tidak boleh ragu-ragu dalam setiap bertindak di lapangan terhadap setiap kezaliman yang dilakukan oleh kaum nekolim. Hal tersebut perlu dilakukan karena melihat kenyataan yang ada di lapangan, kaum nekolim telah berusaha menghancurkan revolusi Indonesia dengan segala cara. Dengan melihat kenyataan tersebut, Soetjipto Joedodihardjo berkeinginan membentuk AKRI yang utuh, efektif, dan penuh daya improvisasi.<sup>48</sup> Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, mau tidak mau AKRI harus menomorsatukan tugas mengamankan revolusi dari serangan nekolim, meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan revolusioner selaku salah satu unsur kekuatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer serta mengadakan integrasi secara menyeluruh dengan rakyat selaku bhayangkara revolusi.<sup>49</sup>

Semua itu hanya merupakan sebagian kecil dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh AKRI pada saat itu. Pada dasarnya, selama masih ada kejahatan, di situ AKRI siap selalu menghadapinya. Kondisi tersebut telah menempatkan AKRI, baik secara fungsi, posisi, maupun sepak terjangnya menjadi Angkatan Kepolisian Rakyat Indonesia dan Angkatan Kepolisian Ampera, sesuai dengan Doktrin AKRI pada saat itu, yaitu *Tata Tentrem Kerta Raharja* dengan bersendikan *Keamanan Rakyat Semesta* yang berisikan pengamanan masyarakat.<sup>50</sup>

Keberhasilan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo yang lain dalam upayanya membangun AKRI adalah dengan disusunnya Program Perjuangan AKRI. Keberhasilan penyusunan program perjuangan tersebut secara tidak langsung merupakan wujud dari kebulatan tekad AKRI secara konkret dan positif dalam

48 *Sinar Harapan*, 5 Juni 1965. Amanat Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo yang disampaikan dalam acara sertijab Pangdak VII, dari Brigjen Polisi T.A. Aziz kepada Brigjen Polisi RM Sawarno Tjokrodiningrat.

49 *Kompas*, 2 Juli 1965. menyebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, setiap anggota polisi harus senantiasa berpegang teguh pada moral revolusi Pancasila, yang diimplementasikan dengan sikap saling asuh, saling asah dan saling asih.

50 *Angkatan Bersenjata*, 7 Juli 1965. Konsep *Tata Tentrem Kerta Raharja* mencerminkan pandangan AKRI tentang keamanan dalam arti yang luas karena tidak hanya tertib, tenteram, dan aman, tetapi juga mengandung arti kesejahteraan. Selanjutnya, paham keamanan ini disesuaikan dengan masyarakat modern, yaitu keamanan tidak lagi bersifat individual, tetapi kolektif. Dengan demikian, keamanan merupakan tujuan agar masyarakat hidup secara tata tentrem kerta raharja.

usahanya menyesuaikan diri dengan *exploding demands* dari rakyat Indonesia yang sedang berevolusi.<sup>51</sup>

Program Perjuangan Takari meliputi berbagai aspek, antara lain: mental ideologi, politik, program aksi dan sarana dengan mengintegrasikan secara konkret dengan rakyat serta penggalangan persatuan nasional *progresif revolusioner* berjiwa nasakom untuk membina bersama secara *social understanding, social responsibility, social control, social support, dan social participation* dengan parpol-parpool, ormas-ormas, dan alat-alat revolusi lainnya. Setelah disusunnya Program Perjuangan Takari dan guna mendukung tindakan-tindakan berikutnya, langkah yang ditempuh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selanjutnya adalah dengan mengaktifkan Komando Operasi Mental *Transatrisma* serta menyusun pelaksanaannya dengan semboyan satunya kata dengan perbuatan.<sup>52</sup>

M.Ng.SoetjiptoJoedodihardjodalamupaya membangun dan membenahi AKRI tidak saja memfokuskan diri pada masalah-masalah organisasi saja, tetapi juga memperhatikan pembenahan terhadap personelnya. Menurutnya, suatu organisasi atau lembaga tidak akan dapat berjalan/bekerja dengan baik apabila tidak didukung atau diimbangi dengan pengetahuan personelnya.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, mau tidak mau M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo juga berusaha meningkatkan pengetahuan di lingkungan AKRI dengan tujuan peningkatan kualitas personelnya. Langkah yang diambil oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, antara lain melalui penyelenggaraan kursus/pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh internal AKRI maupun melalui jalinan kerja sama dengan komponen/instansi terkait di luar AKRI, seperti Pendidikan dan Latihan Kesenjataan Intendans, *Logistics Management Development Course*, dan *Procrement Managament Course*.

Pembenahan dalam tubuh AKRI yang dilakukan oleh Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo di atas bukannya tanpa risiko, salah satu konsekuensi yang harus diterima AKRI pada saat itu adalah keluar dari

51 Kebulatan tekad dan program perjuangan AKRI tersebut dirumuskan dalam rapat Panglima Daerah Angkatan Kepolisian Indonesia, pada tanggal 1-4 September 1965. Program perjuangan tersebut diberi nama "*Program Perjuangan Takari*".

52 *Angkatan Bersenjata*, 8 Juli 1965. Disebutkan juga bahwa selain pembentukan Komando Operasi Mental, Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo juga membentuk komando khusus dengan nama "Komando Pertahanan Anti Subversif" yang bertujuan menghancurkan setiap usaha yang mengarah kepada tindakan subversi dan kontra revolusioner.

53 *Harian Pelopor Baru*, 31 Agustus 1966.

*International Police* (Interpol).<sup>54</sup> Namun, dengan keluarnya AKRI dari Interpol bukan berarti eksistensi AKRI di mata dunia internasional menjadi pudar. Sebaliknya, AKRI menjadi lebih berperan dalam Program Aksi Internasionalnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Konferensi Para Kepala Polisi Nefos dengan mengambil prakarsa untuk membentuk Organisasi Kerja Sama Antar-Kepolisian Nefos.



Sebagai bentuk implementasi pembenahan dalam tubuh AKRI, Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selalu menekankan adanya sikap disiplin yang tinggi pada tiap personel

### 5.1.2 Pembentukan Akademi Angkatan Kepolisian (AAK)

Sebagai upaya meningkatkan mutu kepolisian, di samping melakukan pembenahan organisasi, pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas personel kepolisian. Di mata M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, untuk dapat membentuk dan membangun Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) atau polisi yang tangguh, profesional dan kuat, kunci utamanya terletak pada bagaimana keadaan serta kondisi personel atau sumber daya manusia (SDM)-nya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut,

<sup>54</sup> *Angkatan Bersenjata*, 7 September 1965.

dibutuhkan suatu proses yang sangat tidak mudah, dan untuk memulainya ia mempunyai gagasan yang sangat cemerlang, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungannya dengan tujuan membentuk dan menghasilkan perwira-perwira yang mempunyai kecakapan dan profesional. Tujuan dari pembentukan lembaga-lembaga pendidikan perwira tersebut adalah untuk membentuk perwira-perwira AKRI yang memiliki *technischeid* dan *akademische veroning*, yaitu perwira yang mempunyai kecakapan dalam berpikir, *insteim methode* dan cepat serta pandai menggali konsepsi-konsepsi baru dengan *rising dan exploding demands* terhadap revolusi. Implementasi dari gagasan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo tersebut diwujudkan dengan upayanya membentuk Akademi Angkatan Kepolisian (AAK)

Di lingkungan PTIK terdapat salah satu bagian yang disebut bagian *bakalaureat*. Pada perkembangan selanjutnya, bagian ini dijadikan perguruan tersendiri dengan nama Akademi Ilmu Kepolisian (AIK) dan pada 25 Mei 1965 diubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK). Dengan sendirinya, kedudukan AAK, baik secara organisasi maupun administrasi, terpisah dari PTIK. AAK selanjutnya berkedudukan di Sukabumi, Jawa Barat.<sup>55</sup>

Sekitar pertengahan tahun 1965 di Sekolah Angkatan Kepolisian Sukabumi terjadi perubahan yang sangat mendasar dan prinsipil sebagai realisasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 290/1964 tanggal 12 Nopember 1964 tentang integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), termasuk Polri. Selanjutnya, Kepres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (Skep) Presiden Nomor 155 dan Nomor 185/Koti/1965 tentang integrasi akademi angkatan ke dalam Akademi Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Sebagai tindak lanjut dari keppres di atas, Men/Pangak M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo meresmikan Akademi Angkatan Kepolisian pada tanggal 1 Oktober 1965 bertempat di Sukabumi Jawa Barat. Berdasarkan Keppres di atas, angkatan pertama dari AAK tersebut dinamakan Angkatan Batalion Dharma.<sup>56</sup>

Pada 6 Juli 1965, AAK berubah menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia (Akabri) Bagian Kepolisian dengan lama pendidikan empat tahun.

55 *Harian Pelopor*, 7 Oktober 1965. Taruna angkatan pertama AAK berjumlah 300 orang yang datang dari seluruh pelosok tanah air.

56 Jend. Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, 2006 : *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari jaman kuno sampai sekarang*, Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta.

Pelaksanaan tahun pertama pendidikan merupakan pendidikan terintegrasi di Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia Umum dan Darat (Akabri darat) dengan tempat pendidikan di Magelang Jawa Tengah. Kemudian, sesuai dengan perkembangan zaman, menurut Keppres Nomor 52 tahun 1969, tanggal 17 Juni 1969 nama atau sebutan Akabri Bagian Kepolisian berubah menjadi Akademi Kepolisian (Akpil).

### 5.1.3 Peranan Polri dalam Penumpasan G-30-S/PKI

Periode kepemimpinan R. Soetjipto Joedodihardjo dapat dikatakan sebagai masa kepemimpinan yang paling rumit dan kompleks dalam sejarah Polri karena waktu ditandai dengan terjadinya tragedi nasional, yaitu meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI yang berusaha menghancurkan serta mengkhianati kekuatan Pancasila.<sup>57</sup>

Pada pukul 07.15 tanggal 1 Oktober 1965, melalui RRI Jakarta yang sudah dikuasai oleh pihak pemberontak, Letnan Kolonel Untung mengeluarkan pengumuman pertama. Dalam pengumuman pada waktu itu dikatakan bahwa pada tanggal 30 September telah dilancarkan suatu gerakan militer terhadap anggota “Dewan Jenderal” yang merencanakan akan mengadakan kudeta. Ia juga menyebutkan bahwa gerakan yang dilancarkan tersebut dinamakan “*Gerakan Tiga Puluh September*”. Sebagai tindak lanjut gerakan itu, akan dibentuk “Dewan Revolusi” yang akan menjadi sumber segala kekuatan dalam negara. Dengan demikian, Kabinet Dwikora dinyatakan demisioner. Dewan Revolusi juga akan dibentuk di daerah-daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa.

Dalam pengumuman selanjutnya, dicantumkan nama-nama anggota Dewan Revolusi walaupun sebagian besar tanpa setahu mereka. Dewan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dibantu oleh beberapa wakil ketua, yakni Brigjen TNI Supardjo, Letkol Udara Heru Atmojo, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anwas. Tentu saja Pengumuman atau pemberitaan tersebut telah membuat kondisi negara menjadi kacau atau *chaos* karena disebutkan bahwa di antara anggota Dewan Revolusi tersebut terdapat

---

57 Irjen Polisi (Purn) Memet Tanumidjaya, SH, 1995, Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian, Pusjarah dan Tradisi ABRI, Jakarta. Dijelaskan bahwa “Gerakan 30 September” tersebut bukanlah merupakan soal intern Angkatan Darat atau intern ABRI. Fitnah bahwa Angkatan Darat atau ABRI telah membentuk “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan *coup* terhadap Pemerintah RI, pada hakikatnya hanya merupakan salah satu agitasi propaganda politik yang licik untuk *camouflage* bagi *coup* yang akan dilaksanakan.

nama-nama petinggi negara, salah satunya Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo.

Pada waktu G-30-S/PKI melancarkan gerakannya, Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo sedang berada di Sukabumi dalam rangka peresmian pembukaan Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) yang upacaranya akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1965. Setelah ia mendengar berita tentang terjadinya G-30-S/PKI, Men/Pangak segera kembali ke Jakarta dan mengambil tindakan seperlunya. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mengirim radiogram kepada para pimpinan kepolisian di seluruh Indonesia, isinya antara lain :

- a. Tidak benar bahwa Men/Pangak duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia buatan PKI.
- b. Tercantumnya nama Men/Pangak dalam Dewan Revolusi Indonesia adalah di luar sepengetahuannya.
- c. Angkatan Kepolisian tetap taat kepada Presiden Panglima Tertinggi.
- d. Agar memulihkan anggota kepolisian secara aktif turut memulihkan keadaan yang aman dan tertib seperti semula.

Kemudian, selang dua hari, tepatnya 3 Oktober 1965 Men/Pangak mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

- a. Tidak tahu-menahu adanya apa yang disebut dengan Dewan Jenderal dan tidak mengakui apa yang dinamakan Dewan Jenderal.
- b. Dengan sendirinya berita yang menyatakan adanya jenderal-jenderal polisi yang duduk dalam apa yang disebut Dewan Jenderal, dan perwira-perwira AKRI yang duduk dalam apa yang dinamakan Dewan Revolusi adalah tidak benar.
- c. Alhasil AKRI sebagai kekuatan yang kompak, bersatu padu menghadapi Gerakan 30 September 1965 tersebut.
- d. AKRI membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk menyelesaikan pemulihan keamanan dan ketertiban berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh PYM Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Penegasan Men/Pangak tersebut menjelma dalam kebulatan tekad para panglima angkatan dalam ABRI (AD, AL, dan AK). Pada siang hari, masih pada

1 Oktober 1965, disusun pengumuman tentang adanya kerja sama antara AD, AL dan AK untuk menumpas pemberontakan G-30-S/PKI.<sup>58</sup>

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut pada 15 Oktober 1965 diadakan sidang staf umum Departemen Angkatan Kepolisian. Dalam hal ini, Men/Pangak memberikan *briefing* yang kembali menegaskan bahwa G-30-S/PKI adalah suatu *coup* dan merupakan gerakan kontra revolusi. Terdapat dugaan kuat bahwa G-30-S/PKI tersebut adalah buah hasil dari permainan politik yang membahayakan Pancasila. Untuk itu, Polri perlu mendukung pemulihan keamanan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk dari komando pemulihan keamanan yang dipertanggungjawabkan kepada Pangkostrad, guna melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengamalkan dan mengamankan Doktrin Pancasila.
- b. Membina keamanan dan ketenteraman politik, yang berarti bahwa segala *funds dan forces* dikerahkan dan dipersatupadukan untuk menghancurkan G-30-S/PKI.
- c. Mengamankan jalannya roda perekonomian dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- d. Melakukan *retooling* dan pemurnian terus-menerus ke dalam tubuh sendiri hingga Kepolisian RI tetap merupakan alat negara yang tangguh dan dapat dipercaya.

Demikianlah, fakta-fakta bersejarah mengenai penegasan sikap warga Polri, dalam menanggulangi G-30-S/PKI yang selanjutnya pada 16 Oktober 1965 mendapatkan perumusan lengkap dalam Pedoman Politik Polri dan Pedoman Operasi Pembinaan Masyarakat untuk menanggulangi G-30-S/PKI dan segala akibatnya. Pedoman-pedoman tersebut didasarkan kepada :

- a. Pancasila serta doktrin pelaksanaannya, yaitu Sapta Marga, Tri Brata, dan Catur Prasetya.
- b. Doktrin Polri: Tata Tentrem Kerta Raharja.
- c. Pen. Pres No. 7/1959, Pen Pres. No. 11/1961, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan perundang-undangan lain dari Peperda.
- d. *Briefing* penegasan Men/Pangak 15 Oktober 1965.

<sup>58</sup> *Harian Pelopor*, 7 Oktober 1965, menyebutkan bahwa Pengumuman tentang adanya kerja sama AD, AL, dan Polri dalam usahanya menumpas G-30-S/PKI disiarkan secara luas baru pada malam harinya jam 21.10, setelah studio RRI Jakarta dikuasai kembali oleh RPKAD, oleh kekuasaan Pemerintah RI yang sah pada jam 19.20.

Seperti dugaan semua pihak bahwa aksi yang dilakukan oleh G-30-S/PKI ternyata telah meluas dan merajalela di berbagai daerah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu semua menjadi tanggung jawab aparat keamanan, termasuk Polri, dalam upayanya menumpas sisa-sisa G-30-S/PKI demi menciptakan kembali kondisi negara yang aman dan terkendali.

Peranan Polri di masa kepemimpinan Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo terhadap upaya menumpas atau menggagalkan gerakan pemberontakan PKI, menjadi cerminan dari peranan Polri di daerah-daerah dalam menumpas sisa-sisa gerakan pemberontak PKI.<sup>59</sup>

Di daerah-daerah, anggota Polri turut aktif bersama-sama membantu pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menumpas pemberontakan PKI, seperti yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi. Di Jawa Tengah peran Polri terfokus di daerah-daerah atau kantong-kantong kekuatan/basis PKI, seperti Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Kemudian, di Sulawesi, kegiatan terfokus di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Dengan kesigapan dan kerja sama yang padu antara Polri dan TNI serta dukungan dari rakyat sekitar, akhirnya aksi-aksi pemberontakan PKI di daerah-daerah berhasil diredam, bahkan berhasil ditumpas secara tuntas.<sup>60</sup>

## 5.2 Kepemimpinan pada Masa Orde Baru (Orba)

### 5.2.1 Situasi Politik Pasca-Pemberontakan G-30-S/PKI

Setelah gagalnya aksi kudeta G.30. S/PKI, rakyat dan ABRI, termasuk kekuatan di pihak Polri, berpendapat bahwa PKI harus dibubarkan dan para pembunuh/pelakunya harus dihukum. Pendapat tersebut berbeda dari pendapat Presiden Soekarno, yang menganggap bahwa pemberontakan G-30-S/PKI hanya sebuah *een rimpeltje in de ocean* atau riak kecil dalam gelombang samudra, tidak perlu dibesar-besarkan.<sup>61</sup> Ia menganjurkan agar rakyat tetap

59 *Angkatan Bersenjata*, 2 Februari 1966, menyebutkan bahwa karena telah berjasa dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban akibat Gestok serta dianggap cakap dalam memimpin Angkatan Kepolisian, Men/Pangak Irjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Pelantikan dilakukan oleh Presiden Soekarno bersama-sama dengan kenaikan pangkat Mayjen Soeharto menjadi Letjen selaku Men/Pangad.

60 Kerja sama dengan satuan TNI, jajaran atau kekuatan satuan Polri di daerah setingkat komres dengan bantuan satuan Brimob, banyak berperan/terlibat langsung dalam menumpas dan membersihkan sisa-sisa pemberontakan PKI di daerah-daerah, seperti di Jawa Tengah dan Sulawesi.

61 Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000. *Sejarah TNI Jilid IV*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan pada sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 8 Oktober 1965 di Bogor.



tenang, jangan sampai diadu domba sehingga *neo-kolonialisme* (nekolim) akan mendapat keuntungan. Pernyataan Presiden Soekarno menimbulkan suasana konflik dalam masyarakat yang makin lama makin runcing.

Pemerintah berusaha mengetahui pendapat rakyat dengan cara membentuk sebuah panitia yang diberi nama *Fact Finding Commision* (FFC) Koti. Panitia ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Mayor Jenderal TNI dr. Sumarno Sosroatmodjo. Anggotanya terdiri dari Men/Pangak Inspektur Jenderal M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menteri Penerangan Achmadi, Menteri Agraria Hermanses, Menteri Negara Oei Tjoe Tat, Ketua GV/Koti Brigadir Jenderal TNI Sunarso, Kilian Sekokang (Parkindo), Chalid Mawardi (NU), dan Zaini Mansur (PNI). Tugas komisi ini adalah menghimpun segala fakta dan keterangan serta bukti-bukti tentang peristiwa G-30-S/PKI beserta epilognya.<sup>62</sup>

Anggota-anggota komisi tersebut dikirim ke daerah-daerah selama hampir satu bulan (27 Desember 1965-9 Januari 1966). Kesimpulan yang diperoleh komisi adalah bahwa rakyat berkeinginan keras supaya Presiden Pemimpin Besar Revolusi segera mengambil alih tindakan penyelesaian politik. Namun, saran-saran FFC tersebut selalu ditunda-tunda oleh Presiden Soekarno dan rakyat hanya diberi janji-janji saja.

Lambannya penyelesaian masalah G-30-S/PKI, menyebabkan mahasiswa dan pelajar melakukan demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh rakyat. Demonstrasi-demonstrasi itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) pada 10 Januari 1966 kepada Pemerintah, yang berbunyi Bubarkan PKI, *Retool* Kabinet Dwikora, dan Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

ABRI mendukung aspirasi mahasiswa, tetapi dalam pelaksanaannya memilih cara pendekatan musyawarah, yaitu dialog yang dilakukan oleh Pangkoptik Mayor Jenderal TNI Soeharto dengan Presiden Soekarno. Inti dialog tersebut, Mayor Jenderal TNI Soeharto meminta kepada Presiden agar PKI dibubarkan. Upaya ini tidak berhasil karena Presiden berpendapat bahwa Pembubaran PKI bertentangan dengan prinsip persatuan berdasarkan nasionalisme, agama, dan komunis (Nasakom). Presiden Soekarno berpendapat: "Akan buruklah pandangan dunia apabila pencetus Nasakom tidak kokoh kepada konsepsi politiknya sendiri". Ia juga mengatakan: "Seribu Dewa dalam kayangan tak dapat memamatkan Nas, memamatkan A, dan memamatkan

---

62 *Angkatan Bersenjata*, 28 Desember 1965.

Kom...” “...Dan ini dapat kupegang teguh sampai aku masuk ke liang kubur...”.

Sebaliknya, Jenderal Soeharto berpendapat bahwa rakyat lebih diutamakan daripada kepentingan luar negeri karena ideologi komunis sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa dan pelajar tersebut, Presiden dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora 15 Januari 1966 memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Soekarno” guna mempertahankan kedudukannya terhadap apa yang dirasakan sebagai usaha untuk mendongkelya. Seruan Presiden itu disambut oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio pada 16 Januari 1966 dengan menyatakan Barisan Soekarno bertujuan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Keinginan untuk membentuk barisan Soekarno juga dilontarkan pada apel kesetiaan para Menteri Kabinet Dwikora, 20 Januari 1966. Pada kesempatan itu Dr. Subandrio menyatakan Barisan Soekarno siap menghadapi dan menghancurkan lawan politik Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Presiden Soekarno sendiri pada rapat umum menyukseskan *Conference of The New Emerging Forces (Conefo)* pada 23 Februari 1966, menyatakan: “Bangun dan bentuk Barisan Soekarno”. Seruan itu mendapat banyak dukungan, menambah buruk situasi. Sementara itu, dari daerah-daerah ada yang mengusulkan sebaiknya jabatan wakil presiden segera diisi.

Dalam menangkal ofensif politik tersebut, pimpinan ABRI pada tanggal 16 Januari 1966 menyatakan sikapnya dengan mengeluarkan pernyataan tetap taat kepada Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI di samping menyerukan kekompakan sesama ABRI dan kekompakan ABRI dan rakyat. ABRI berpendapat secara fisik Barisan Soekarno tidak perlu dibentuk karena seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno dan jabatan wakil presiden untuk sementara dikosongkan saja. Sementara itu, tindakan tegas melarang pembentukan Barisan Soekarno berasal dari Pangdam VI/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Ibrahim Adjie, yang diperkuat oleh Men/Pangad/Pangkopkamtib Letnan Jenderal TNI Soeharto.

Situasi konflik saat itu tidak saja merupakan konflik politik yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan politik, tetapi juga konflik konstitusional karena di satu pihak MPRS menghendaki ditaatinya keputusan-keputusan MPRS, sedangkan di lain pihak Presiden dengan menggunakan dalih Undang-Undang Dasar 1945 menolak untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada MPRS. Situasi konflik tersebut merupakan

pula konflik sosial karena pada saat itu terdapat golongan-golongan yang pro dan kontra.

Pada saat itu terdapat tiga pendapat mengenai penyelesaian konflik. Pendapat pertama, menyatakan bahwa sasaran utama adalah menjatuhkan Presiden Soekarno sebagai benteng Orde Lama. Pendapat tersebut didukung oleh sebagian besar kesatuan aksi dan ormas. Pendapat kedua menyatakan bahwa sasaran utama adalah Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera sehingga persoalan Presiden Soekarno dianggap bukan persoalan besar. Janganlah keutuhan dan keselamatan negara dikorbankan hanya karena persoalan Presiden Soekarno. Ketiga, terdapat pula golongan yang masih mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Soekarno.

### 5.2.2 Mengawal dan Menyukkseskan Pelaksanaan Catur Karya dan Dwi Dharma Kabinet Ampera

Pada 25 Juli 1966 Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan membentuk Kabinet Ampera. Berdasarkan TAP MPRS No. XIII tahun 1966, Presiden menugaskan pembentukan Kabinet Ampera kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS No. IX tahun 1966.<sup>63</sup> Tugas pokok Kabinet Ampera berdasarkan TAP MPRS No. XIII tahun 1966 adalah mewujudkan Dwi Dharma, yaitu Stabilitas Politik dan Stabilitas Ekonomi. Sementara itu, program Kabinet Ampera disebut dengan Catur Karya.<sup>64</sup>

Dalam rangka/tugas mengawal dan menyukkseskan pelaksanaan Catur Karya dan Dwi Dharma Kabinet Ampera, pimpinan AKRI/kepolisian dalam hal ini Men/Pangak, telah menentukan pokok-pokok kebijakan antara lain bidang pertahanan dan keamanan (hankam), meningkatkan kegiatan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dengan tidak mengurangi pengertian dalam tugas-tugas hankam.<sup>65</sup>

Di bidang politik, AKRI bertekad untuk membina kesatuan dan persatuan *progresif revolusioner Pancasila*, berasaskan Tri Abdi Ampera,

63 *Harian Pelopor Baru*, 7 September 1966.

64 *Harian Pelopor Baru*, 28 Juli 1966. Catur Karya yaitu :

- a. Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
- b. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.
- c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 dan melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk dan manifestasinya.

65 *Kompas*, 27 Agustus 1966.

ikut serta membina Orde Baru dengan sikap mental *receptive*, *persuasive*, dan tidak *confrontative*, bermodalkan kekompakan dan persatuan dalam tubuh ABRI sebagai kekuatan politik yang nyata. Selain itu, melanjutkan pembersihan terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI, meningkatkan kewaspadaan terhadap *subversi komunis* tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap *subversi nekolim* dan golongan kontra revolusioner di dalam negeri serta peningkatan/perluasan operasi mental Tan Satrisna.

Di bidang ekonomi diprioritaskan pada pengamanan distribusi termasuk di dalamnya pemberantasan manipulasi dan korupsi. Meningkatkan *civil mission* sebagai aspek pengabdian dengan turut sertanya segenap unsur dan potensi AKRI dalam sektor produksi nasional, khususnya diarahkan pada tugas-tugas re-edukasi dan rehabilitasi masyarakat.

Dalam bidang sosial, antara lain peningkatan usaha dan kegiatan dalam pembinaan kepramukaan serta peningkatan Operasi Darma Bhakti AKRI. Sementara itu, dalam bidang Budaya, AKRI bertekad untuk mengamankan kebudayaan nasional dengan waspada/mencegah penetrasi kebudayaan asing terutama kebudayaan komunis. Di samping itu, AKRI turut serta membina manusia budaya dan meningkatkan adanya *cultural leaders* serta peningkatan pendidikan mental dan agamisme Pancasila.

Keberhasilan AKRI/kepolisian dalam mengamalkan dan menyukseskan pelaksanaan Catur Karya dan Dwi Dharma Kabinet Ampera tersebut dijadikan sebagai cerminan bagi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak dalam mengamankan serta menyukseskan pelaksanaan Sidang Umum MPRS /1966 dan Sidang Istimewa MPRS 1967.

### **5.2.3 Penyelesaian Masalah Intern Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI)**

#### **5.2.3.1 Pemurnian dan Pembersihan dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI)**

Sebagai kelanjutan dalam rangka usaha pemurnian tubuh AKRI Men/Pangak M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. 34/SK/MK/66 tanggal 5 April 1966 tentang pembentukan *Team Clearance* persoalan BPI dengan AKRI.<sup>66</sup> Tim tersebut bertugas mengumpulkan,

66 *Kompas*, 9 April 1966, menyebutkan bahwa terdapat "masalah" yang terjadi antara AKRI dan BPI, kalau tidak segera diselesaikan akan berakibat fatal dan mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI.

mempelajari, dan mengadakan penelitian fakta/keterangan mengenai anggota AKRI yang dalam menjalankan tugasnya telah merugikan tugas BPI sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 8/59 tentang pembentukan Badan Pusat Intelijen (BPI).

Tugas selanjutnya adalah mengajukan usul/pendapat kepada Men/Pangak untuk dapat dipakai sebagai bahan dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Tim ini terdiri dari dua Perwira Tinggi AKRI, dua perwira menengah AKRI, dibantu oleh dua Perwira Menengah Angkatan Darat, untuk menjamin objektivitas semaksimal mungkin. Demi menyelenggarakan *social control* yang sehat dan *konstruktif*, Men/Pangak mengharapkan bantuan positif dari masyarakat dalam bentuk pemberian informasi berdasarkan kenyataan yang objektif.

Sebagai kelanjutan dari pembentukan *Team Clearance*, persoalan BPI dengan AKRI, Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mengambil kebijakan untuk membebaskan sementara delapan orang perwira AKRI dari tugasnya di Jakarta sambil menunggu hasil *clearance* tim tersebut.<sup>67</sup>

Sehubungan dengan Instruksi Men/Pangak No.Pol/Ins/66, Pangdak VIII Jawa Barat menginstruksikan, supaya mereka yang bersangkutan melaporkan diri melalui saluran-saluran komando menurut kategori sebagai berikut :

- a. Mereka yang secara fungsional ditugaskan serta diperbantukan pada BPI
- b. Mereka yang secara pribadi menjadi pembantu tetap BPI/oknum BPI
- c. Mereka yang secara insidental memberikan bantuan atau informasi kepada BPI.
- d. Mereka yang pernah diminta bantuan secara langsung atau tidak langsung berupa informasi atau tindakan oleh BPI/oknum BPI.
- e. Mereka yang dibiayai/diberi fasilitas oleh BPI dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu yang ada hubungannya dengan “pengganyangan Malaysia” atau keamanan nasional lainnya.

Bagi mereka yang tergolong kategori (a), di samping melaporkan diri juga diperintahkan membuat laporan lengkap tentang apa yang telah dilakukan

<sup>67</sup> *Kompas*, 13 April 1966. Kebijakan tersebut diikuti dengan keluarnya Instruksi Men/Pangak No. Pol/Ins/66 tentang wajib lapor bagi anggota AKRI yang pernah mempunyai hubungan dengan BPI.

dalam hubungannya dengan kegiatan BPI. Terhadap mereka yang kemudian ternyata tidak mengindahkan instruksi tersebut akan diambil tindakan administratif menurut ketentuan yang berlaku.

Salah satu kebijakan atau langkah yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “berani” adalah ketika Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo memprioritaskan kebijakan pembersihan tubuh AKRI dari unsur-unsur PKI ataupun kontra revolusi (kontrev) lainnya, termasuk pendukung-pendukungnya.<sup>68</sup> Tekad Men/Pangak adalah berupaya mencegah sekaligus memberantas sisa-sisa kelompok G-30-S/PKI sehingga dalam menerapkan kebijakan tersebut, ia tidak *pandang bulu* meskipun itu merupakan anggotanya sendiri.

### 5.2.3.2 Digagalkannya Upaya Pendongkelan Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI)

Kebijakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dalam upayanya menumpas habis sisa-sisa kekuatan kelompok pemberontak G-30-S/PKI, ternyata tidak mendapat dukungan semua pihak, termasuk jajaran kepolisian sendiri. Hal tersebut terlihat dengan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil kesempatan tersebut dengan cara melakukan upaya *pendongkelan* terhadap pimpinan AKRI pada saat itu demi kepentingan kelompok mereka. *Pendongkelan* mereka lakukan dengan alasan bahwa mereka tidak melihat adanya kesungguhan/itikad baik dari jajaran kepolisian/AKRI dalam upaya pembersihan diri dari Gestapu/PKI.<sup>69</sup>

Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo melihat bahwa apa yang dilakukan kelompok tersebut telah menunjukkan tidak adanya loyalitas kembali di antara mereka dan alasan yang mereka kemukakan hanya mengada-ada saja tanpa dilandasi dengan bukti-bukti yang kuat.<sup>70</sup> Ia menilai bahwa dalih anti-Gestapu/PKI telah mereka salah gunakan sebab, menurutnya, upaya pembersihan

68 *Kompas*, 29 Juli 1966. Men/Pangak Komjen Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Juli 1966 bersama-sama dengan ketiga Panglima ABRI pada saat itu, Men/Pangad, Men/Pangal, dan Men/Pangau.

69 *Harian El Bahar*, 18 Agustus 1967. Kelompok tersebut di bawah pimpinan Brigjen Polisi H. Soejono Prawiro Bismo, S.H., Brigjen Polisi Soeparto, dan Komisaris Besar Polisi Drs. Bugisupena. Tindakan mereka melakukan pengumpulan tanda tangan telah melanggar Perintah Harian Men/Pangak No. 1 tanggal 17 Mei 1965, sehingga tindakan mereka dindikasi sebagai upaya *pendongkelan* terhadap pimpinan AKRI pada saat itu.

70 *Kompas*, 26 Juli 1966.

yang dilakukan oleh Polri saat itu masih berlangsung dan terus dilakukan, sampai Polri benar-benar “bersih” dari pengaruh ideologi Komunis/PKI.<sup>71</sup>

Namun, tindakan yang dilakukan oleh Men/Pangak pada saat itu ternyata menimbulkan masalah baru. Pemeriksaan dan penahanan yang dilakukannya terhadap sejumlah pejabat/pimpinan di lingkungan kepolisian pada saat itu, telah menimbulkan tanda tanya dan kegelisahan di kalangan Polri pada umumnya. Mereka mempertanyakan apakah harus disertai dengan penahanan jika sikap dan tindakan beberapa perwira tersebut bersifat korektif ke dalam?<sup>72</sup> Banyak kalangan melihat, justru penelitian dan pemeriksaan terhadap perwira-perwira polisi lain yang nyata-nyata terindikasi atau *kwetsbare figuren* gerakan G-30-S/PKI atau bahkan Dewan Jenderal berjalan sangat lamban.<sup>73</sup>

Namun, kondisi yang terjadi pada saat itu mampu dijawab oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak dengan keberhasilannya melakukan pemeriksaan secara intensif yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan terhadap mereka/kelompok yang diindikasikan terlibat dalam upaya pendongkelan dan Gestok. Kepolisian mengambil tindakan, antara lain:<sup>74</sup>

- a. Golongan/kelompok yang terindikasi dan terlibat dalam G-30-S/PKI, yaitu golongan Brigjen Polisi Sawarno dkk. ( Brigjen Polisi Sawarno dkk. terdiri atas KBP Drs. Otot S.M. dan AKBP Drs. Drajat), atas permintaan Pangkokam diserahkan kepada Teperpu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- b. Golongan/kelompok Brigjen Polisi H. Soejono, KB Polisi Drs. Boegi Supeno dkk. yang dengan dalih ingin melakukan/mengadakan pembersihan dalam tubuh AKRI/Polri telah melakukan *pendongkelan* terhadap pimpinannya.

Langkah-langkah atau upaya pembersihan anggota AKRI/Polri dari kelompok G-30-S/PKI atau bahkan Orla oleh Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo secara intensif dan terus-menerus dilakukan.

71 *Harian Pelopor Baru*, 8 Juni 1967. Menyebutkan bahwa dari 125.000 warga Polri/AKRI di seluruh Indonesia pada saat itu yang terlibat atau diindikasikan terlibat dalam peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI berjumlah sekita 713. Diantaranya terdapat 2 Perwira Tinggi (Pati), 35 Perwira Menengah (Pamen), 108 PNS, dan 41 tamtama. Dari sekian jumlah tersebut yang terbanyak berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan semuanya itu masih dalam taraf pemeriksaan ataupun penahanan.

72 *Harian Pelopor Baru*, 26 Juli 1966.

73 *Sinar Harapan*, 25 Juli 1966.

74 *Kompas*, 18 Agustus 1967. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI Jenderal Soeharto, Polri/AKRI mengambil tindakan berupa tindakan administrasi disiplin (pensiun) terhadap kelompok Brigjen Polisi Soejono.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga dilakukan sampai ke wilayah-wilayah/daerah setingkat komdak.<sup>75</sup>

#### 5.2.4 Pemberantasan Korupsi dan Penyelundupan

Proses perubahan yang makin tinggi menyebabkan timbulnya *kepincangan-kepincangan* serta eksekusi/akibat yang harus dihadapi dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi pula. *Kepincangan* dalam bidang politik atau keadaan yang tidak menentu akan menyebabkan terjadinya pecah belah dan adu domba antara anak bangsa (tindak subversif dan gerakan politik G-30-S/PKI).

Di lain pihak, proses perubahan tersebut juga menyebabkan *kepincangan* di bidang lain, yaitu bidang ekonomi, yang bersifat eksploitasi kekayaan negara dan bangsa, antara lain berupa tindak korupsi dan penyelundupan serta usaha-usaha yang sangat merugikan negara.

Itulah yang terjadi pada saat itu. Masalah satu selesai, timbul lagi masalah berikutnya. Masalah yang berkaitan dengan politik (G-30-S/PKI atau PKI) dapat diselesaikan, muncul masalah lain yang lebih rumit dan butuh penyelesaian secepatnya, yaitu masalah ekonomi, menyangkut aksi-aksi penyelundupan dan korupsi yang makin marak.

Maraknya tindak penyelundupan dan korupsi tersebut menimbulkan keprihatinan dalam diri jajaran Polri. Polri sebagai abdi atau aparat penegak hukum dan keamanan merasa bersalah dan malu sampai timbul atau maraknya aksi-aksi tersebut. Oleh karena itu, perlu pemikiran dan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh jajaran Polri, khususnya oleh Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak saat itu.

Dalam menghadapi masalah tersebut, Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo berusaha dengan mengadakan tindakan yang berupa tindakan administrasi dan prosedur kerja melalui penataan yang lebih baik, dengan cara menciptakan sarana-sarana yang cukup memadai dan baik sehingga tidak memungkinkan bagi orang untuk berbuat jahat atau tindak korupsi.<sup>76</sup>

75 *Merdeka*, 6 Desember 1967. Perwira-perwira polisi yang *diciduk*/tindak di daerah Jawa Barat terdiri dari Kasi Reskrim Komdak VIII/Jabar AKBP Drs. Dody Soetarly, *Security Officer* gedung MPRS AKBP Enduh, mantan Kepala Polisi Seksi IV kota Bandung AKBP Rushardi, dan Komandan Intel Komres Bandung AKBP Teko.

76 *Duta Masyarakat*, 31 Januari 1968. Disampaikan oleh Men/Pangak pada saat upacara serah terima jabatan Pangdak II di Sumatra Utara.



Tanggung jawab tersebut bukan hanya tugas dari Polri semata, melainkan merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara aparat Polri dukungan rakyat. Dengan demikian, akan muncul keterpaduan atau kerja sama antara Polri/Angkatan Kepolisian dan masyarakat/rakyat untuk bersama-sama dapat mengabdikan kepada kepentingan umum daripada kepentingan golongan.

Sebenarnya, upaya atau langkah-langkah Polri dalam menindak atau memberantas aksi/tindak penyelundupan dan korupsi sudah termaktub dalam panca sasaran sebagai sasaran umum dalam Program Kerja AKRI tahun 1968.<sup>77</sup> Hal tersebut merupakan satu kesatuan integritas kepemimpinan nasional yang benar-benar harus dilaksanakan dan dirasakan oleh aparat bangsa.

Langkah berikutnya adalah membuat kemampuan aparatur negara, khususnya administrasi negara, secara optimal dan mengembangkan apa yang telah dicapai dalam pancatertib, serta menciptakan kristalisasi kekuatan sesama Orde Baru, membina dan mengarahkan orientasi kekuatan Orde Baru ke arah satu sikap dan pandangan.

Banyak pelanggaran atau tindak seperti tindakan penyelundupan dan korupsi (pelanggar hukum), dapat dikatakan atau disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang kurang baik, pada saat itu. Namun, hal tersebut dapat diberantas dan ditindak apabila semua aparat penegak hukum berpedoman dan berpegang pada pancatertib hukum. Untuk dapat menciptakan panca tertib hukum bergantung kepada pelaksana dan penegak hukum itu sendiri, dan tertib hankam mengakibatkan penegak-penegak hukum akan menjadi tertib.

### **5.2.5 Pembentukan Pramuka Bhayangkara**

Dengan latar belakang adanya keinginan serta tekad dari Polri, dalam hal ini Men/Pangak, bahwa Polri ingin menjunjung tinggi serta mengamalkan Doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja dengan paham keamanan rakyat semesta, yaitu keamanan dari untuk dan oleh rakyat, atau dapat pula berarti keamanan dari pemuda untuk pemuda dan oleh pemuda, Men/Pangak memelopori pembentukan Pramuka Bhayangkara.

---

<sup>77</sup> *Duta Masyarakat*, 31 Januari 1968.



Men/Pangak sebagai warga kehormatan Resimen Pelopor, 29 Maret 1967



Gagasan tersebut akhirnya terealisasi pada 3 Juli 1966 dengan penandatanganan instruksi bersama tentang pembentukan Pramuka Bhayangkara, antara Men/Pangak dan Waperdam Ekubang/Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam instruksi bersama tersebut, antara lain dinyatakan, agar secara berdikari semua pangdak bekerja sama dengan kwartir daerah dan cabang gerakan pramuka di seluruh Indonesia, segera membentuk gugus-gugus depan Pramuka.<sup>78</sup>

Dengan pembentukan Bhayangkara Pramuka tersebut, Men/Pangak punya harapan, yaitu makin terbukanya kemungkinan dan kesempatan bagi para pemuda yang sedang bergerak membina dirinya melalui jalan kepanduan dan gerakan Pramuka, untuk meningkatkan mutu potensinya sebagai bhayangkara negara dan pengaman masyarakat dalam suatu kerja sama dan bantuan Angkatan Kepolsian/Polri secara terorganisasi dan berencana.

Dengan demikian, nantinya pembentukan Bhayangkara Pramuka tersebut akan menghasilkan jenis organ satuan gaya, yaitu *special troop* yang pertama dalam gerakan pramuka, yang bergerak di bidang karya bhayangkara, untuk bersama-sama dalam satuan *task force* berlatih dan dilatih oleh Angkatan Kepolisian dalam karya pengaman masyarakat.

Upaya tersebut sama sekali bukan merupakan gerakan pionir atau seperti yang ada di negara-negara komunis, sama sekali bukan pula *jiplakan* dari gerakan *scouting* di negara-negara lain.<sup>79</sup> Pembentukan gerakan tersebut adalah gerakan kepanduan yang merupakan hasil perwujudan dari jiwa dan kepribadian bangsa “,...menjadi pandu ibuku...” dalam lagu Indonesia Raya. Gerakan Pramuka adalah observasi dan penyelidikan, baik di dalam maupun di luar negeri.

### **5.2.6 Memasuki Purna Tugas**

Pada 9 Mei 1968 diadakan serah terima jabatan Men/Pangak Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo kepada Men/Pangak yang baru Komisaris Jenderal Polisi Drs. Hoengeng Iman Santoso di lapangan olahraga (depan kantor Mabak) Jalan Trunojoyo no. 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

<sup>78</sup> *Sinar harapan*, 5 Juli 1966.

<sup>79</sup> *Harian Pelopor Baru*, 4 Juli 1966.

Selama hampir tiga tahun Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak), telah banyak diperoleh kemajuan dan keberhasilan pada masanya. Keberhasilan pada masa kepemimpinannya di masa Orde Lama, antara lain: pembenahan dalam tubuh AKRI atau kepolisian saat itu, pembentukan AAK, dan penumpasan pemberontakan G-30-S/PKI. Keberhasilan kepemimpinan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo di masa Orde Baru, makin terlihat secara nyata, antara lain mengawal dan mengamankan Kabinet Ampera, pembersihan dan pemurnian AKRI/kepolisian dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan pembentukan Bhayangkara Pramuka.

Karier Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo berangkat dari lingkungan Mobrig sehingga tidak heran apabila pengabdian dirinya terhadap Polri lebih banyak dihabiskan di lingkungan Mobrig.<sup>80</sup> Dengan latar belakang atau didikan Pasukan Mobrig, M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo mampu menjalankan tugas sebagai Men/Pangak atau Kapolri dengan baik. Segala hambatan/tugas yang berat ataupun ringan dapat diselesaikan serta dituntaskan secara baik berkat dukungan dan loyalitas para bawahannya, termasuk saat-saat ia berhasil mengamankan dan mengawal pelaksanaan Sidang Umum MPRS 1966 hingga Sidang Istimewa 1967.

Keberhasilan dalam karier dan tugas yang telah diraihnyanya tidak datang dengan sendirinya, tetapi diraih dengan penuh perjuangan, pengorbanan serta ketekunan dalam diri M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo. Latar belakang kehidupan yang keras dan berat di masa kecil, dijadikannya sebagai motivasi dan pijakan dalam setiap melaksanakan atau memecahkan segala permasalahan. Hal tersebut tecermin dari sosok M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo yang dikenal sebagai sosok yang polos, sederhana, dan tekun beribadah. Kesederhanaan dan kejujurannya tersebut telah ikut mewarnai pribadi dan kehidupannya. Sedikit pun ia tidak angkuh, baik sewaktu masih menjabat sebagai Men/Pangak ataupun sesudah pensiun.

Dari tugas yang banyak ia emban, olehnya dipilih beberapa yang amat penting, yang paling mendesak dan benar-benar harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Sifat demikian itu merupakan sifat-sifat figur seorang pemimpin. Untuk itu, tugas sebagai Ketua I Yayasan Pendidikan Tinggi

80 *Berita Yudha*, 30 Maret 1967. Karena dedikasinya yang tinggi terhadap keberadaan Mobrig, Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo selaku Men/Pangak diangkat sebagai warga kehormatan Men Por (Resimen Pelopor)

Dakwah Islam (PTDI)<sup>81</sup> dan Wakil Ketua Yayasan RS Fatmawati dibebankan kepada M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo, semenjak ia pensiun.<sup>82</sup>

Jenderal Polisi R. Soetjipto Joedodihardjo setelah menyerahkan jabatan sebagai Men/Pangak kepada Komjen Polisi Drs. Hoengeng Iman Santoso, kemudian memasuki masa pensiun (MPP), dan baru pensiun dari jajaran kepolisian pada 1 November 1972.

Pada 26 Maret 1984, Jenderal (Purn) Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo meninggal dunia setelah menderita sakit liver dalam usia 67 tahun. Walaupun ia telah meninggal, sosok almarhum akan tetap dikenang sebagai salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa. Pada hari wafatnya itu Presiden Soeharto berkenan melayat di rumah duka Jalan Cirebon No. 6 Menteng, sebagai penghormatan terakhir Pak Harto atas kerja sama yang telah terbangun antara beliau dan almarhum selama masa sulit awal membangun Orba.

Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, almarhum telah dianugerahi 13 tanda jasa oleh Pemerintah RI berupa empat buah bintang dan sembilan buah satya lencana kesetiaan, antara lain Bintang Kelas I dan Kelas II, Bintang Gerilya, dan Bintang Dharma.

---

81 *Kompas*, 27 Maret 1984, menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) merupakan lembaga pendidikan dan dakwah yang berdiri pada awal tahun 1960; Organisasi ini didirikan oleh para perwira ABRI termasuk Polri, yang beragama Islam, antara lain Letjen Sarbini, Letjen Sudirman, Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo dan Marsekal Udara Soejono, dan Laksamana Madya Soemadi. Pada awal pendiriannya, lembaga ini aktif menyelenggarakan pendidikan rakyat.

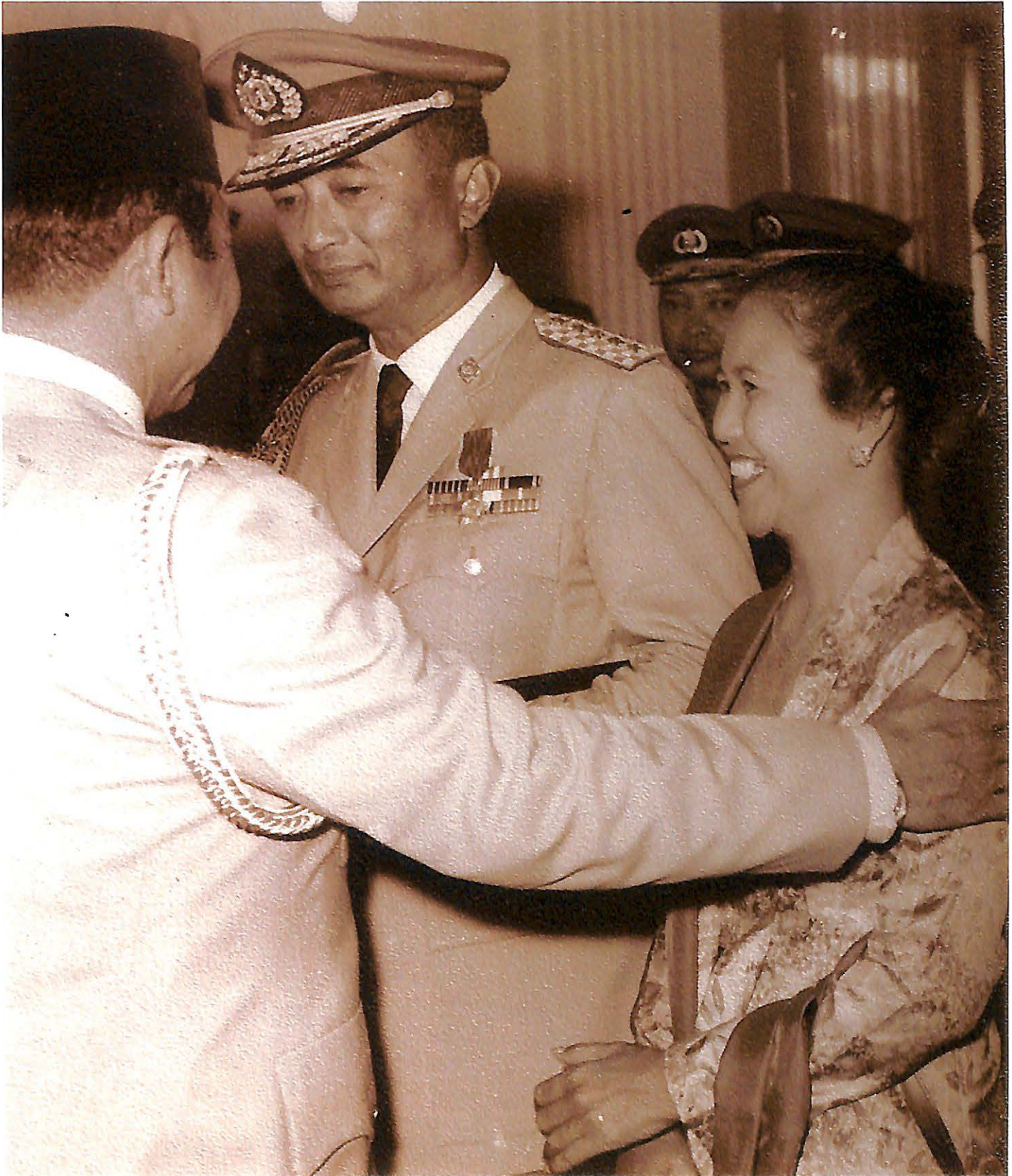
82 *Berita Buana*, 27 Maret 1984. Semenjak R. Soetjipto Joedodihardjo pensiun, sampai akhir hayatnya aktivitas lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan agama.



2 Juli 1967  
Pemberian Bintang  
Bhayangkara Kelas I  
ke Jenderal TNI  
A.H. Nasution

Men/Pangak menerima  
Bintang Bhayangkara  
(duduk Komisaris Jenderal  
Polisi R. Soemarto)





Men/Pangak M. Ng. Soetjpto Joedodihardjo Menerima Bintang Darma dari Presiden RI Ir. Soekarno



Kesuksesan dan keberhasilan M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo dalam menapak kairer, salah satunya di sebabkan adanya dukungan dan dorongan Istri, anak serta keluarga

Salah satu puncak kebahagiaan dalam diri M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo antara lain berhasil menuju jenjang/ kehidupan baru







Kerja sama dan koordinasi selalu dilakukan oleh Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto selaku Men/Pangak dengan kesatuan lain, yaitu AL, AD, dan AU dari keutuhan NKRI



Kebahagiaan yang dirasakan oleh M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo salah satunya adalah dapat berada di tengah-tengah anak, cucu, dan keluarga

KATALOG  
MEDIA MASSA  
DAN  
KEPUSTAKAAN



# KATALOG MEDIA MASSA DAN KEPUSTAKAAN

## **A. Media Massa**

1. *Angkatan Bersenjata*, 2 Juli 1965. "AKRI Berjuang untuk Amankan Revolusi".
2. *Angkatan Bersenjata*, 6 Oktober 1962. "Irjen Polisi Odang Tidak Tersangkut".
3. *Angkatan Bersenjata*, 7 Juli 1965. "Jadikan Seksi Polwan Kebanggaan AKRI".
4. *Angkatan Bersenjata*, 7 September 1965. "AKRI Adalah A.K. Revolusi Indonesia dan A.K. Ampera".
5. *Angkatan Bersenjata*, 7 September 1965. "AKRI Keluar dari International Police".
6. *Angkatan Bersenjata*, 15 November 1965. "Tumpas Habis Gestapu dengan Kobaran Semangat Nasakom Jiwaku".
7. *Angkatan Bersenjata*, 16 November 1965. "Perintah Harian Men/Pangak".
8. *Angkatan Bersenjata*, 23 Desember 1965. "Penumpasan Gestapu-PKI Tetap Jalan Terus".
9. *Angkatan Bersenjata*, 28 Desember 1965. "AKRI Harus Amankan Komando Presiden Pangti ABRI".
10. *Angkatan Bersenjata*, 5 Djanuari 1966. "PKI Memimpin, Merencanakan serta Melaksanakan " G/30/S".
11. *Angkatan Bersenjata*, 1 Februari 1966. 6 "Perwira Tinggi AKRI dapat Tanda Jasa".

12. *Angkatan Bersenjata*, 2 Februari 1966. "Presiden Lantik Kenaikan Pangkat Men/Pangad dan Men/Pangak".
13. *Angkatan Bersenjata*, 14 Februari 1966. Pataka "Admaniwedana" Diserahkan Kepada A.A.K".
14. *Angkatan Bersenjata*, 13 Juni 1966. "Men/Pangak Sinyalir Penyelewengan Baru: Ada yang Ingin Belokkan Revolusi ke Kanan".
15. *Angkatan Bersenjata*, 22 Juli 1966. "Tri Kerangka Tujuan Revolusi Tetap Ditegakkan".
16. *Angkatan Bersenjata*, 15 Juni 1966. "Men/Pangak : Bertindaklah Sesuai dengan Pernyataan ABRI 5 Mei 1966".
17. *Angkatan Bersenjata*, 4 Agustus 1966. "Penyelesaian Intern AKRI Perlukan Kecepatan Berfikir dan Tindakan Tegas".
18. *Angkatan Bersenjata*, 22 September 1966. "Penjelasan Men/Pangak, " Sekitar Disebut-sebutnya Irjen Polisi Danukusumo oleh DJMD".
19. *Angkatan Bersenjata*, 4 April 1967. "Tingkatkan Kegiatan AKRI INSP. Jenderal AK Barometer dari Intensitas Kerja".
20. *Angkatan Bersenjata*, 9 Desember 67. "AKRI Goncang karena Berita Pengunduran Diri Pangak".
21. *Antara*, 19 Maret 1966. "AKRI Yakin Akan Kebenaran PBR".
22. *Antara*, 8 Juli 1965. "Serah Terima Pangdak IX Jawa Tengah".
23. *Berita Buana*, 27 Maret 1984. "Pak Soetjipto Joedhodihardjo".
24. *Berita Buana*, 27 Maret 1984. "In Memoriam Soetjipto Joedhodihardjo".
25. *Berita Indonesia*, 15 November 1960. "Mobil brigade Lahir dan Tumbuh dalam Alam Revolusi".
26. *Berita Indonesia*, 10 Mei 1965. "Brigien Polisi Soetjipto Joedhodihardjo Diangkat Sebagai Men/Pangak".
27. *Berita Indonesia*, 29 Mei 1965. "Kebijaksanaan Kepolisian- Saling Asah, Saling Asuh, dan Saling Asih".
28. *Berita Indonesia*, 8 Maret 1967. "Men/Pangak Soetjipto Joedhodihardjo Kepercayaan kepada Pak Harto Kehormatan Bagi ABRI".
29. *Berita Indonesia*, 21 Januari 1967. "Belum Bisa Menegaskan Pendapatnya".
30. *Berita Yudha*, 9 Maret 1967. "Keputusan SI MPRS Jangan Sampai Menimbulkan Konflik Baru".
31. *Berita Yudha*, 29 September 1966. "Men/Pangak Soetjipto Joedodihardjo: ABRI Adalah Satu Tiang Pokok Sokoguru Rev".

32. *Berita Yudha*, 28 Oktober 1966. "Bukti AKRI Tidak Pernah Absen dalam Perjuangan Bersenjata".
33. *Berita Yudha*, 15 November 1966. "Mendewakan Seseorang Merupakan Ketakaburan yang Paling Dibenci Tuhan".
34. *Berita Yudha*, 17 November 1966. "Belum Ada Anggota AKRI yang Terlibat".
35. *Berita Yudha*, 17 November 1966. "Men/Pangak Soetjipto Joedodihardjo: ABRI Adalah Satu Tiang Pokok Sokoguru Rev".
36. *Berita Yudha*, 9 Maret 1967. Pem. "Umum SI MPRS Rabu Malam Jenderal Polisi. Soetjipto Joedodihardjo: Keputusan SI MPRS Jangan Sampai Menimbulkan Konflik Baru".
37. *Berita Yudha*, 30 Maret 1967. "Pak Joedho diangkat sebagai warga Kehormatan Brimob".
38. *Berita Yudha*, 16 Juli 1966. "Pancasila Tak Boleh Jadi Monopoli Golongan".
39. *Berita Yudha*, 8 Juli 1967. "Bintang Bhayangkara Kelas I untuk Jenderal Nasution".
40. *Berita Yudha*, 4 Desember 67. "Bukan Uniform yang Tunjukkan Adanya Polisi".
41. *Duta Masyarakat*, 14 November 1967. "Pangak Soetjipto Joedodihardjo: Faktor Agama di Indonesia Merupakan Hal yang Prinsipil".
42. *Duta Masyarakat*, 20 Pebruari 1967. "Men/Pangak: Maju Terus untuk Tidak Menuju Jurang Kenistaan".
43. *Duta Masyarakat*, 2 Mei 1967. "Jend. Polisi Soetjipto Joedodihardjo, Usaha Penelitian dan Pengembangan Patut Mendapat Perhatian".
44. *Duta Masyarakat*, 18 Mei 1967. "Pangak Bertekad Berantas "Pungutan-Pungutan Liar" oleh Oknum-Oknum AKRI".
45. *Duta Masyarakat*, 29 Januari 1968. "Pangak Jenderal Pol Soetjipto Joedhodihardjo: Jangan Ragu-Ragu Membicarakan Piagam Jakarta".
46. *Duta Masyarakat*, 31 Januari 1968. "Pangak Jenderal Pol Soetjipto Joedhodihardjo Korupsi Hanja Bisa Diberantas Jika Diadakan Administrasi dan Prosedur Kerja yang Baik".
47. *Duta Masyarakat*, 22 Maret 1968. "Pangak Jenderal Pol Soetjipto Joedhodihardjo Umat Islam Jangan Selalu Disalahkan".
48. *Duta Masyarakat*, 31 Juli 1967. "Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo: Penghayatan Pancasila Akan Berhasil jika ABRI Dapat Menertibkan Diri Masing Masing".

92. *Harian Pelopor Baru*, 26 Agustus 1966. "AKRI Tidak Dewa-Dewakan Bung Karno".
93. *Harian Pelopor Baru*, 31 Agustus 1966. "Peningkatan Pengetahuan di Lingkungan AKRI".
94. *Harian Pelopor Baru*, 7 September 1966. "AKRI Waspada thd Subversi Komunis".
95. *Harian Pelopor Baru*, 21 September 1966. "Men/Pangak Kepada Polisi Lalulintas : "Jangan Adakan Pecetopan yang Tidak Perlu".
96. *Harian Pelopor Baru*, 19 Oktober 1966. "Bhayangkari Membantu Dwi Dharma Kabinet".
97. *Harian Pelopor Baru*, 26 Oktober 1966. "Men/Pangak Kepada Staf Koordinasi Polisi Khusus".
98. *Harian Pelopor Baru*, 28 Oktober 1966. "Pemuda-Pemuda Indonesia Tidak Tenggelam Dalam Penindasan".
99. *Harian Pelopor Baru*, 14 November 1966. "AKRI Pegang Teguh Pernyataan Bersama ABRI 5 Mei".
100. *Harian Pelopor Baru*, 16 November 1966. "Bintang Dharma untuk Tauladan".
101. *Harian Pelopor Baru*, 8 Desember 1966. "Roda Peradilan Dalam AKRI Diharapkan Berputar Cepat".
102. *Harian Pelopor Baru*, 9 Januari 1967. "Sore Ini: Presiden Buka Puasa Sama-Sama Men/Pangak Besok "Pelengkap" ke MPRS".
103. *Harian Pelopor Baru*, 18 Januari 1967. "Men/Pangak belum Punya Fakta-Fakta Nyata tentang Gerpok/PKI".
104. *Harian Pelopor Baru*, 2 Februari 1967. "AKRI Jelaskan Sikap Ada yang Dirahasiakan".
105. *Harian Pelopor Baru*, 28 Februari 1967. "Soepardjo Mengaku sebagai "Orangnya Bung Karno".
106. *Harian Pelopor Baru*, 2 Mei 1967. "PARA WISHUDA" AKRI KE I Djakarta, 2 Mei ( Plb-ra)".
107. *Harian Pelopor Baru*, 8 Juni 1967. "Polisi-Polisi yang Diadili".
108. *Harian Perlorpor Baru*, 6 September 1967. "Reorganisasi ABRI Besar-Besaran Menteri-Menteri Angkatan Hapus".
109. *Harian Pelopor Baru*, 28 November 1967. "Menjalankan Da'wah Berarti Melaksanakan Panca Tertib".



110. *Harian Pelopor Baru*, 6 Desember 1967. "Penangkapan Perwira-Perwira AKRI Atas Perintah Pangak".
111. *Harian Pelopor Baru*, 7 Desember 1967. "MABAK Bantah Pengunduran Diri Pangak Brigjen Pol. Azis lagi Cuti".
112. *PAB*, 8 Oktober 1965. "Gestapu Membahayakan Pancasila".
113. *Sinar Harapan*, 6 Oktober 1966. "Men/Pangak pada HUT ABRI Kontradiksi-kontradiksi Jangan Jadi Antagonistis".
114. *Sinar Harapan*, 20 Desember 1967. "Pangak ke Jateng".
115. *Sinar Harapan*, 27 Desember 1967. "Sembilan Pangdak Diganti".
116. *Sinar Harapan*, 4 Oktober 1967. "Tentang Pendongkelan Pimpinan AKRI IrDjen Pol. Kodak Tidak Tersangkut".
117. *Sinar Harapan*, 14 November 1967. "Pangak Sutjipto Joedodihardjo Faktor Agama di Indonesia Merupakan Hal jang Prinsipiiil".
118. *Sinar Harapan*, 14 November 1961. "Pidato Radio Komandan Brigade Mobil Pusat".
119. *Sinar Harapan*, 3 Juni 1965. "AKRI Harus Utuh, Efektif & Penuh Daya Improvisasi".
120. *Sinar Harapan*, 25 Januari 1966. "Idul Fitri Pangkal Tolak Tingkatkan Perjuangan Revolusi".
121. *Sinar Harapan*, 19 Februari 1966. "Pangak Lapor Presiden".
122. *Sinar Harapan*, 15 Juni 1966. "Jawa Timur Jadi Benteng Soekarno".
123. *Sinar Harapan*, 6 Mei 1966. "ABRI Pengaman/Pengawal Revolusi, Pengaman Pimpinan Revolusi, Pengaman Kewibawaan Bung Karno".
124. *Sinar Harapan*, 25 Juli 1966. "Beberapa Perwira Polisi Ditahan Rencanakan Mendongkel Pimpinan Angkatan kepolisian".
125. *Sinar Harapan*, 29 Juli 1966. "Konp. Dinas Polisi Wanita Berakhir".
126. *Sinar Harapan*, 23 September 1966. "Polisi Lalulintas Jangan Nyetop-Nyetop kalau Tidak Perlu".
127. *Sinar Harapan*, 20 Januari 1967. "Men/Pangak Soetjipto: Masyarakat Berhak Menyampaikan Cetusannya".
128. *Sinar Harapan*, 5 April 1967. "Tugas Polisi LL Pengawal, Pelindung, Pengaman Rakyat".
129. *Sinar Harapan*, 3 Mei 1967. "AKRI Harus Memiliki Kualifikasi Keparaan".

## B. Kepustakaan

- Djamin, Awaloedin. 2006. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Jaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta : Disjarah Polri.
- B. Wiwoho, Banjar Chaeruddin. 1990. *Memori Jenderal Yoga*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan. 1994. *Perintis Kemerdekaan Perjuangan dan Pengorbanannya*. Jakarta: Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia* Jilid 16. 1991. Jakarta: PT. Cipta adi Pustaka.
- Cahyono, Heru. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- In Memoriam Drs. H. Mohamad Hasan Jenderal Polisi Purnawirawan* 20 Maret 1920 – 23 Pebruari 2005 [ ]
- Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers. 1971. *Pemilu 1971*. Jakarta
- Rush, Michael dan Althoff. 1986. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.



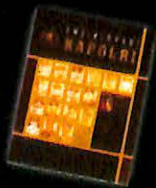


15  
DESE  
19



Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto menerima Ketua Panitia Penulisan **Ensiklopedi Kapolri** Irjen Pol (Purn) Drs. Dasoeki dan koordinator **Tim Penulis Ensiklopedi Kapolri** Dr. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto di ruang kerjanya Jalan Trunojoyo, Jakarta pada bulan Oktober 2006. Dalam pertemuan tersebut diserahkan bahan data pers 18 mantan Kapolri dan Kapolri sebanyak lebih dari 5.000 berita.

Dari data pers tersebut **Ensiklopedi Kapolri** disusun yang refleksinya selain menuntun penulis untuk menemukan sosok Kapolri juga sekaligus mampu membuat gelombang pemikiran dan keputusan yang ada, bukan saja memperkaya sejarah Polri tetapi juga memperkaya sejarah Republik Indonesia sejak merdeka di tahun 1945 sampai sekarang. Secara jujur harus dikatakan bahwa kehadiran polisi di negeri ini jauh lebih dahulu dibandingkan dengan kelahiran Indonesia merdeka.



## PANITIA PENULISAN ENSIKLOPEDI KAPOLRI

Sekretariat: Jl. Citra Raya 8 Antapani Bandung • Telp. (022) 7206695 • HP. 0818226487

Dokumentasi: Griya Depok Asri, Jl. Griya Asri Selatan B7/25 - Depok 16411 Telp. (021) 7707527 HP. 08129886801

ISBN 978-979-16296-0-7



9 789791 629607 >